

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOHAMAD ROEM: SEORANG PEJUANG INDONESIA (1946-1949)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

SEPTI DARU KURNIAWATI

NIM : 011314014

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2007

SKRIPSI

MOHAMAD ROEM: SEORANG PEJUANG DIPLOMASI INDONESIA

(1946-1949)


Oleh:

SEPTI DARU KURNIAWATI

NIM : 011314014

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I


Prof. DR. PJ. Suwarno, SH.

Tanggal, 14 Maret 2007

Pembimbing II


Drs. Sutardjo Adikusilo, JR. S. Th

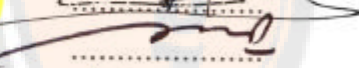
Tanggal, 14 Maret 2007

SKRIPSI

MOHAMAD ROEM: SEORANG PEJUANG DIPLOMASI INDONESIA
(1946-1949)

Dipersiapkan dan ditulis oleh :
SEPTI DARU KURNIAWATI
NIM : 011314014

Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji
Pada tanggal 14 Maret 2007
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Sutardjo Adisusilo J.R., S. Th.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M. Pd.	
Anggota	: Prof. DR. P.J. Suwarno, SH.	
Anggota	: Drs. Sutardjo Adisusilo, jr. S. Th.	
Anggota	: Drs. B. Musidi, M. Pd.	

Yogyakarta, 14 Maret 2007

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan




Drs. Farsisius Sarkim, M. Ed., Ph. D.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, kupersembahkan karya

sederhana ini untuk :

- *Sang Penguasa Jagad Raya, Allah SWT atas karuniaNya hingga skripsi ini bisa terselesaikan.*
- *Alm. Bapak Suwandi dan Ibundaku Supartini serta ade-adeku yang kusayangi Sigit Wicaksono, Aditya Tri Setyo, Dimas Catur Hariyadi yang telah memberikan cinta kasih dan dorongan baik secara material maupun spiritual.*
- *Keluarga besar di Wonosari maupun di Prambanan yang telah memberikan dukungannya.*
- *Sahabat-sahabatku yang terkasih Vivin, Minnie dan Jovita. Teman-teman dekatku Nopi, Hendrix, Joni, Bondan, Dibyo, Siska, Ovie, Maria, Lipo, Puji, Edi, De Tyas. Thanks for being my friends. I can't never ever forget you in my life. Love ya'all.*
- *Mbaku tersayang Endah Retno Riyanti. Thanks for the support and for helping me to finished my thesis.*
- *Teman-teman PPL Borobudur Sensy, Kristin, Suster Irene, Nita, Frans, Aryo, Longgi.*
- *Keluarga Om Nardi yang bersedia meminjamkan komputernya buatku.*
- *My soulmate somewhere out there whose going to be my couple of life. I'm too exciting to wait and see who you really are.*

MOTTO

- *Kegagalan bukanlah suatu hal yang harus ditangisi, kegagalan juga bukanlah suatu hal yang harus diratapi karena susah, senang, sedih dan gembira itu batasnya terlalu tipis (Endah).*
- *Segala sesuatu yang benar dan adil bila diperjuangkan dengan jujur dan ikhlas cepat atau lambat pasti akan memperoleh kemenangan (Mohamad Roem).*
- *Ada hal yang mungkin kamu tidak suka tapi itulah yang baik buat kamu, dan apa pula yang amat kamu sukai, namun itu ada buruknya buat kamu. Allah-lah yang tahu dan kamu tidaklah tahu. (Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, ayat 216).*
- *Footprints on the sands of time are not made by sitting down. It's never too late to mend. Jejak langkah dari masa lampau tidak dibuat hanya dengan berpangku tangan. Belum ada kata terlambat untuk merubah diri. (Penulis).*
- *“Man proposes, God disposes “. Manusia hanya bisa berikhtiar, Tuhan jua yang menentukan. (Penulis).*

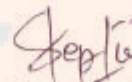
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

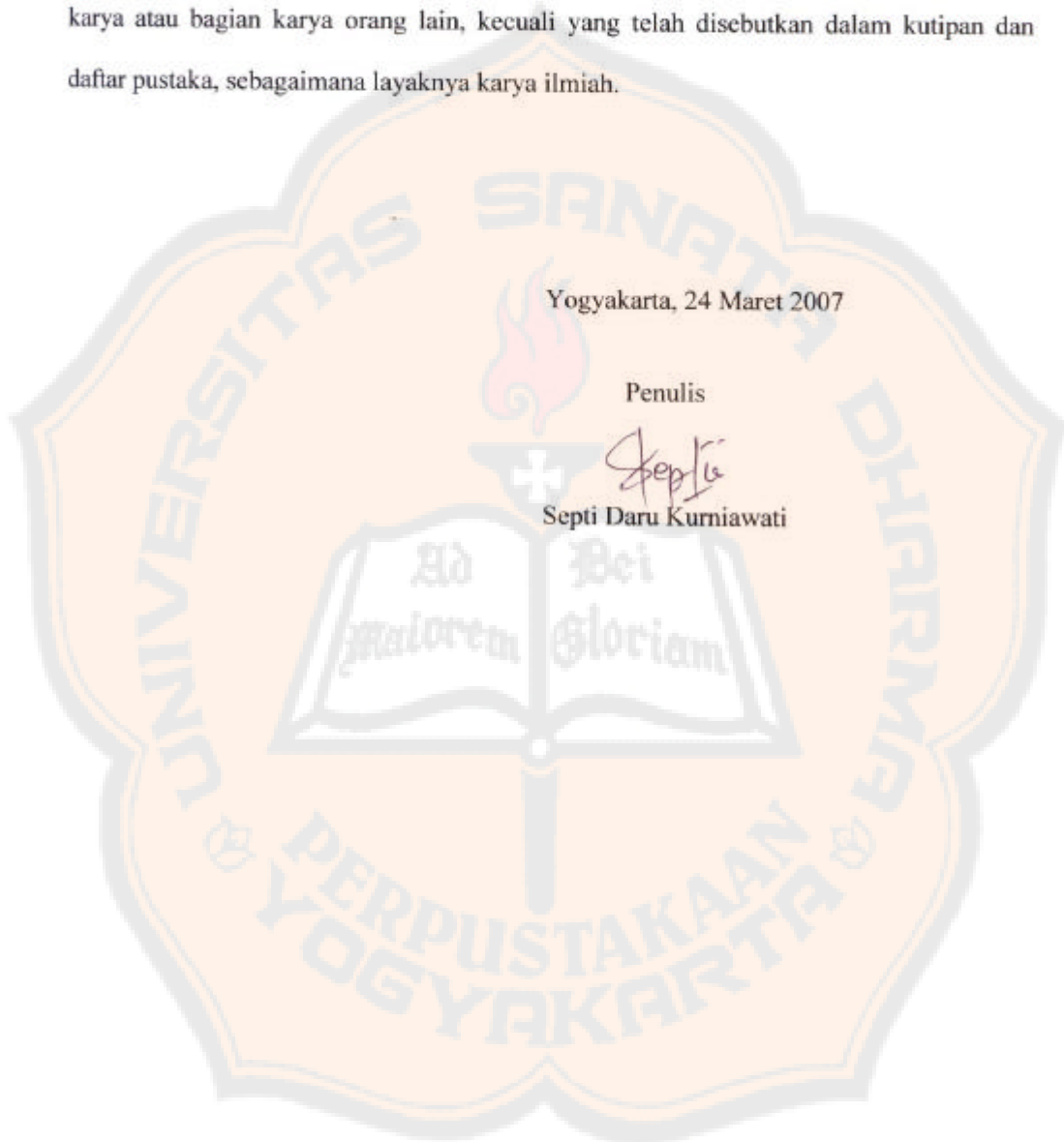
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 24 Maret 2007

Penulis



Septi Daru Kurniawati



ABSTRAK

Judul : ‘Mohamad Roem : Seorang Pejuang Diplomasi Indonesia (1946-1949)

Penulis : Septi Daru Kurniawati

Skripsi ini berjudul “ Mohamad Roem : Seorang Pejuang Diplomasi Indonesia (1946-1949) “. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas mengenai latar belakang Mohamad Roem hingga mampu terjun ke dunia politik, peranan politik Mohamad Roem sebagai pejuang diplomasi, hasil yang diperoleh Mohamad Roem ketika menjadi seorang diplomat ternama.

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah. Adapun langkah-langkah metode penelitian sejarah mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi serta historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik, sedangkan penulisannya dikaji secara deskriptif analitis.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa latar belakang Mohamad Roem terjun ke dunia politik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu latar belakang keluarga masa-masa kecil hingga remaja Mohamad Roem, latar belakang pendidikan dan latar belakang keikutsertaannya dalam organisasi politik sebagai pejuang diplomasi.

Peranannya dalam bidang politik sebagai pejuang diplomasi dimulai ketika ia ditunjuk sebagai anggota delegasi dalam beberapa perundingan yaitu perundingan Linggajati tahun 1946, perundingan Renville tahun 1947, perundingan Roem-Royen tahun 1948, dan Konferensi Meja Bundar tahun atau KMB 1949. Bahkan dalam perundingan Roem-Royen ia ditunjuk sebagai Ketua Delegasi dari Indonesia sedangkan dalam KMB, ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Delegasi mendampingi Mohammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Ketua Delegasi dari Indonesia.

Sebagai seorang pejuang diplomasi, Mohamad Roem juga memberikan hasil karya yang gemilang bagi bangsa Indonesia. Hasil karya diplomat tersebut yakni suatu pernyataan Roem-Royen yang merupakan dokumen sejarah yang penting bagi kelanjutan tegaknya Republik Indonesia. Dengan demikian dokumen Roem-Royen menempati kedudukan yang khas yang dikenal oleh seluruh dunia. Ini pula yang telah menempatkan Mohamad Roem dalam deretan nama-nama diplomat dunia dengan hasil karya yang senafas dengan nama pribadi. Selain karyanya di atas hasil perjuangannya dalam bidang pemerintahan pasca KMB adalah menjadi menteri negara tanpa portofolio pada era Kabinet Hatta.

ABSTRACT

Title : "Mohamad Roem : an Indonesian Diplomatic Fighter (1946-1949)
Writer: Septi Daru Kurniawati

This thesis has title "Mohamad Roem: an Diplomatic Fighter (1946-1949)". The aim of this thesis is to discuss the reasons of Mohamad Roem entered into political arena; the political roles of Mohamad Roem as a diplomatic fighter; and the results Mohamad Roem got when he was being a notable diplomat.

This research used historical method. The steps of historical method involve heuristic, resources critique, interpretation and historiography. The approach was political, while the writing was analyzed in descriptive-analytical way.

From this research, it is known that the background of Mohamad Roem entered political world was influenced by some factors, namely familial factor from his childhood to teenager, educational factor and his participatory in political organization as diplomatic fighter.

His role in political field as diplomatic fighter began as he was appointed a delegation member in some discussions, namely Linggajati in 1946, Renville in 1947, Roem-Royen in 1948 and Round Table Conference or RTC in 1949. Even in Roem-Royen discussions, Mohamad Roem was elected as delegation leader from Indonesia. While, in RTC he was assigned as deputy head of Delegation who accompanied Mohammad Hatta, the incumbent of Delegation Head from Indonesia.

As a diplomatic fighter, Mohamad Roem had given his excellent work for Indonesian people. His diplomatic work was in the form of Roem-Royen statements that was a significant historical document for the continuation of Republic of Indonesia existence. Thus, Roem-Royen document occupied special position known throughout the world. This is reason of why Mohamad Roem has special place among the names of the world diplomats with the diplomatic work of his personal name. Beside his work above, the success of his struggle in governmental field after the RTC discussion was being the non-portfolio state minister in Hatta Cabinet era.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas karunia yang telah diberikan kepada penulis. Salah satunya adalah dengan menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mohamad Roem: Seorang Pejuang Diplomat Indonesia (1946-1949)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. PJ. Suwarno, SH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Drs. Sutardjo Adikusilo, JR, S.Th, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Segenap Dosen dan karyawan FKIP Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis belajar di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
7. Karyawan perpustakaan Universitas Sanata Dharma dan UNY yang telah membantu penulis untuk mendapatkan buku dan literatur yang diperlukan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Kedua orangtuaku, alm. Bapak Suwandi dan Ibundaku Supartini serta ketiga ade-adeku Sigit Wicaksono, Aditya Tri Setyo dan Dimas Catur Hariyadi yang selalu memberikan dorongan dan semangatnya selama ini.
9. Teman-teman angkatan 2001 terutama Vivin, Mini, Jovita, Dibyo, Bondan, Lipo, Siska, Ovie, Edi, Puji, Maria dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pertemanan dan persaudaraannya selama ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca pada umumnya dan bagi Universitas Sanata Dharma pada khususnya.

Yogyakarta, 24 Maret 2007

Penulis

Septi Daru Kurniawati

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kajian Teori.....	11
G. Hipotesis	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Pendekatan Penelitian.....	20
J. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II. LATAR BELAKANG MOHAMAD ROEM HINGGA TERJUN KE	
DUNIA POLITIK	24
A. Masa-Masa Kecil hingga Remaja Mohamad Roem.....	24
B. Latar Belakang Pendidikan Mohamad Roem.....	26
C. Latar Belakang Keikutsertaan Mohamad Roem dalam Organisasi Politik	28

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III. PERANAN POLITIK MOHAMAD ROEM SEBAGAI PEJUANG DIPLOMASI INDONESIA.....	34
A. Peranan Mohamad Roem sebagai Anggota Delegasi Indonesia dalam Perundingan Linggajati (1946).....	34
B. Peranan Mohamad Roem sebagai Anggota Delegasi Indonesia dalam Perundingan Renville (1947).....	44
C. Peranan Mohamad Roem sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam Perundingan Roem-Royen (1948).....	51
D. Peranan Mohamad Roem sebagai Wakil Ketua Delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (1949).....	63
BAB IV. HASIL YANG DIPEROLEH MOHAMAD REOM KETIKA MENJADI SEORANG DIPLOMAT TERNAMA.....	67
A. Pernyataan Roem-Royen sebagai Puncak Karya dari Sang Diplomat.....	67
B. Perjuangan Mohamad Roem dalam Bidang Pemerintahan Pasca KMB.....	77
BAB V. PENUTUP.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	89
SUPLEMEN.....	99

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Gambar Tokoh Mohamad Roem
2. Lampiran 2 : Dokumen Hasil Pernyataan Roem-Royen Tanggal 7 Mei 1949 di
Hotel Des Indes Jakarta
3. Lampiran 3 : Gambar Suasana Perundingan Linggajati tahun 1946
4. Lampiran 4 : Gambar Suasana Perundingan Renville tahun 1947
5. Lampiran 5 : Gambar Suasana Perundingan Roem-Royen tahun 1948
6. Lampiran 6 : Gambar Penandatanganan Piagam Penyerahan Kedaulatan
7. Lampiran 7 : Gambar Suasana Pelaksanaan KMB tahun 1949
8. Suplemen Silabus

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memperoleh kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai macam bentuk perjuangan baik itu secara fisik maupun perjuangan diplomasi. Kedua macam bentuk perjuangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah bangsa Indonesia melawan pemerintah kolonial Belanda yang bermaksud menjajah kembali negeri ini. Untuk memperoleh pengakuan kedaulatan RI, tak urung para diplomat besar Indonesia gencar melakukan perjuangan diplomasi dengan mengadakan berbagai macam perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda, dan perundingan-perundingan yang terkenal itu di antaranya adalah perundingan Linggadjati (1946), perundingan Renville (1948), perundingan Roem-Royen (1949), serta Konferensi Meja Bundar (1949). Perundingan-perundingan tersebut turut mewarnai gerak sejarah bangsa Indonesia, terlebih pada masa awal kemerdekaan.

Perjuangan diplomasi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan pertama kali diawali dengan perundingan Hoge Veluwe yang diadakan pada tanggal 14, 21, 22, dan 24 April 1946. Perundingan itu mengalami kegagalan karena Belanda hanya bersedia mengakui Republik Indonesia *de facto* di Jawa dan Madura. Sedangkan Republik menuntut pengakuan *de facto* di Jawa, Madura, dan Sumatera.¹ Karena perundingan yang pertama menemui jalan buntu, maka perundingan kemudian dilanjutkan ke perundingan Linggadjati. Perundingan ini

¹ Mohamad Roem, 1972, *Bunga Rampai dari Sejarah Jilid 1*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 126

ditandatangani pada tanggal 15 November 1946. Dalam perundingan ini, Belanda mengakui Republik *de facto* di Jawa, Madura, dan Sumatera.² Setelah diadakannya perundingan baik itu perundingan Hoge Veluwe maupun Linggadjati, perjuangan diplomasi masih dilanjutkan ke perundingan selanjutnya, yakni perundingan Renville. Perundingan ini diadakan di kapal AS yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok dan ditandatangani pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan Renville ini melibatkan campur tangan PBB³ karena pada saat itu Belanda bermaksud untuk melemahkan dan menghancurkan Republik Indonesia, sehingga menarik simpati dunia untuk membantu RI melawan Belanda. Namun ternyata usaha ini sia-sia karena ternyata Belanda tetap menyerang dan melakukan agresi militernya. Hal ini menyebabkan RI dengan terpaksa menerima persetujuan ini.

Meski telah melalui beberapa perundingan di atas namun pengakuan kedaulatan atas RI masih belum diperoleh. Akan tetapi usaha itu tidak berhenti sampai di sini saja. Perjuangan diplomasi masih dilanjutkan ke perundingan selanjutnya, yakni perundingan Roem-Royen dan KMB. Berbicara mengenai perundingan Roem-Royen, Mohamad Roem memiliki peranan penting dalam perundingan ini. Dalam perundingan pendahuluan tanggal 7 Mei di Hotel Des Indes Jakarta tercapailah persetujuan antara Republik Indonesia dan Belanda. Persetujuan ini terkenal dengan sebutan *van Royen-Roem Statement*.⁴

Dalam persetujuan ini, Indonesia diwakili oleh Mohamad Roem sedangkan Belanda diwakili oleh van Royen. Tetapi seminggu kemudian perundingan

² *Ibid.*, hlm. 127

³ G.Moedjanto, 1988, *Indonesia Abad Ke-20 Jilid 2*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 19

⁴ ST Rais Alamsyah, 1952, *Sepuluh Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Mutiara, Jakarta, hlm. 61

perundingan terhenti lagi karena van Royen menafsirkan bahwa pemerintah Nederland akan memulihkan pemerintahan dan pimpinan-pimpinan RI hanya sesudah pemerintahan RI memerintahkan kesatuan-kesatuan bersenjata untuk menghentikan gerilya mereka dan bekerjasama dalam memulihkan perdamaian dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan dan bersedia menghadiri KMB.⁵

Tidaklah lama untuk mencapai persetujuan ini. Inilah hasil usaha Roem yang paling besar dicapainya dalam dunia diplomasi. Dari keruntuhan negara yang begitu rupa, di mana pemerintah semuanya berada dalam tawanan dan pembuangan, hampir seluruh daerah Republik Indonesia diduduki oleh Belanda pada saat itu benar Roem dapat menciptakan suatu kemenangan.⁶ Setelah persetujuan Roem-Royen kemudian dilanjutkan Konferensi Meja Bundar yang berlangsung dari 23 Agustus- 2 November 1949. Yang menjadi ketua KMB adalah PM Belanda, Drees. Delegasi Belanda dipimpin oleh van Marsee van, RI oleh Hatta dan BFO oleh Sultan Hamid II. UNCI bertindak sebagai mediator.⁷

Dalam KMB ini dihasilkan suatu kesepakatan yang mengatur hubungan antara Indonesia dan Belanda. Di mana dalam perundingan ini menetapkan pengakuan kedaulatan yang lengkap dan tanpa syarat selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949 oleh Belanda kepada RIS. RIS itu terdiri dari 15 negara (daerah) bagian ciptaan Belanda.⁸ KMB merupakan perundingan terpenting di antara perundingan lainnya, sebab melalui KMB-lah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia.⁹ Keberadaan KMB sendiri tidak terlepas dari

⁵ G.Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 53

⁶ ST Rais Alamsyah, *op. cit.*, hlm. 61

⁷ *Ibid.*, hlm. 57

⁸ *Ibid.*, hlm. 57

⁹ Mohamad Roem, *op. cit.*, hlm. 131

keberhasilan perundingan yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu perundingan Roem-Royen yang menghasilkan pernyataan Roem-Royen.¹⁰

Dari perundingan-perundingan yang sekilas telah dikemukakan di atas itulah kita dapat melihat kepiawaian Mohamad Roem sebagai diplomat yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melalui meja perundingan. Beliau yang telah berhasil membujuk Belanda untuk mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta dan menghentikan gerakan-gerakan militer serta membebaskan segera tanpa syarat tahanan politik yang ditangkap sejak tanggal 19 Desember 1948 dalam Republik Indonesia.¹¹

Mohamad Roem telah mencapai karya puncak dalam diplomasi terutama perannya dalam perundingan Roem-Royen. Hasil dari karya diplomat tersebut berupa suatu pernyataan Roem-Royen, yang merupakan dokumen bersejarah yang penting bagi kelanjutan tegaknya Republik Indonesia. Dengan demikian dokumen Roem-Royen menempati kedudukan yang khas yang dikenal oleh seluruh dunia. Ini pula yang telah menempatkan Mohamad Roem dalam deretan nama-nama diplomat dunia dengan karya yang senafas dengan nama pribadinya.¹²

Kemampuan Mohamad Roem sebagai seorang diplomat yang handal yang telah sukses melakukan perundingan dengan Belanda inilah yang telah mendorong penulis untuk mengungkapkannya dalam skripsi yang berjudul “ Mohamad Roem: Seorang Pejuang Diplomat Indonesia (1946-1949)”.

¹⁰ Suratmin, 1986, *Mr. Mohamad Roem Karya dan Pengabdianannya*, Depdikbud, Jakarta, hlm. 96

¹¹ Fachry Ali, Juni 1984, “ *Mohamad Roem Diplomat Pejuang* “, dalam Prisma, no. 6, thn. 13, hlm. 76

¹² Soemarso Soemarsono (ed.), 1978, *Mohamad Roem 70 tahun Pejuang Perunding*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 154

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas untuk mengetahui lebih jelas tentang Mohamad Roem : Seorang Pejuang Diplomasi Indonesia (1946-1949). Permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu :

1. Apa sajakah latar belakang kehidupan Mohamad Roem hingga mampu terjun ke dunia politik pada masa itu ?
2. Peranan politik apa sajakah yang diperoleh Mohamad Roem sebagai seorang pejuang diplomasi dalam menegakkan kemerdekaan RI ?
3. Apa sajakah hasil yang diperoleh Mohamad Roem ketika menjadi seorang diplomat ternama ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan latar belakang Mohamad Roem sebelum terjun di dalam bidang politik.
2. Menjelaskan peranan Mohamad Roem sebagai seorang pejuang diplomasi dalam menegakkan kemerdekaan RI.
3. Menjelaskan hasil yang diperoleh Mohamad Roem ketika menjadi seorang diplomat ternama.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang Mohamad Roem sebagai seorang pejuang diplomasi Indonesia.

2. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Mohamad Roem sebagai seorang pejuang diplomasi Indonesia.
3. Bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah, penelitian ini dapat dijadikan masukan, bahan pertimbangan bahkan pengetahuan tentang Mohamad Roem sebagai seorang pejuang diplomasi Indonesia dalam upaya menegakkan kemerdekaan Indonesia sehingga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme.

E. Tinjauan Pustaka

Munculnya kaum intelektual baru yang menggugat struktur sosial-politik Hindia Belanda merupakan dampak terpenting dari pelaksanaan politik etis yang secara resmi disahkan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1901. Kelompok intelektual, terutama para pelajar Hindia di Belanda dapat mengkomunikasikan langsung dengan berbagai aliran pemikiran yang sedang berkembang di Eropa pada tahun 1928-an, terutama Marxisme, Leninisme dan Sosialisme.

Dengan pemikiran-pemikiran itu, mereka mendapatkan penjelasan tentang situasi penjajahan dan filsafat determinisme historis. Kecuali Semaun yang kemudian menjadi agen komintern di Eropa, metode penjelasan itu kemudian diterapkan untuk Indonesia, tidak dalam bentuk perjuangan kelas melainkan bentuk perjuangan ras antara bangsa Indonesia yang berkulit coklat dengan bangsa Belanda yang berkulit putih, antara Asia dan Eropa dan seterusnya.¹³

Berdasarkan aliran pemikiran itu para pelajar yang dikenal dengan sebutan Perhimpunan Indonesia (PI), sejak tahun 1925 menyusun ideologi nasionalis yang

¹³ John Ingleson, 1983, *Jalan ke Pengasingan. Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, terj. Zamakhsyari Dhofier, LP3ES, Jakarta, hlm. 1

terdiri dari empat pokok: Kesatuan Nasional, Solidaritas, Non-Koperasi dan Swadaya.¹⁴ Sebelumnya di Hindia Belanda, gerakan-gerakan menuntut kemerdekaan yang sama juga bermunculan. Dimulai dengan lahirnya Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), *Indische Partij* (1912), *Indische Sociaal Democratische Vereniging* atau ISDV (1914). Di samping itu bermunculan pula organisasi-organisasi pemuda. Dari organisasi yang bersifat kesukuan sampai organisasi-organisasi pemuda maupun organisasi nasional keagamaan.

Dimulai sejak usia 17 tahun, Mohamad Roem telah aktif dalam pergerakan Islam. Pergerakan yang pertama diikutinya adalah Jong Islamieten Bond atau JIB (1925). Mohamad Roem sendiri pernah mengemukakan “Di dalam pergerakan *Jong Java* dan JIB itu kami semua umumnya sudah menyadari bahwa dengan berorganisasi itu kelak kami akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di kemudian hari. Waktu itu kaum terpelajar bangsa kita menyadari, bahwa mereka dapat kesempatan maju, sehingga oleh karena itu harus mempunyai tekad untuk memimpin bangsanya yang masih sangat ketinggalan di segala bidang kehidupan”.¹⁵ Selain mengikuti *Jong Java* dan JIB, Mohamad Roem juga mengikuti pergerakan Islam lainnya seperti PSII (1932), Gerakan Penyardar (1936), dan Partai Masyumi (1945) setelah Indonesia merdeka.

Berbicara tentang aktivitas politik Mohamad Roem, orang akan selalu mengengangnya sebagai seorang diplomat yang ternama. Hal ini dapat dibuktikan melalui berbagai perundingan antara RI dan Belanda yang pernah diikutinya. Mohamad Roem mempunyai bakat, sifat serta kemampuan yang cocok bagi seorang diplomat. Menurut Ahmad Basuni, Mohamad Roem mempunyai sifat

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁵ Soemarsono Soemarso, *op.cit.*, hlm. 36

tenang, tetapi juga serius, tabah, sabar dan ulet. Selain itu Mohamad Roem juga tidak mudah merajuk.¹⁶

Kemampuan Mohamad Roem dalam berdiplomasi juga tidak terlepas dari pengalamannya bersama Haji Agus Salim, seorang politikus dan diplomat ternama. Sebagai seorang yang pernah dekat dengan Haji Agus Salim selama kurang lebih 25 tahun, Mohamad Roem sang “anak didik” Haji Agus Salim mengakui bahwa ia bisa menjadi “seperti sekarang” adalah karena didikan Haji Agus Salim.¹⁷ Sebagai orang awam, kita tidak pernah tahu, apakah untuk menjadi seorang diplomat perlu mempelajari tentang sesuatu hal ataukah memerlukan suatu bakat yang dipelajari sejak muda.

Diplomasi atau perundingan-perundingan yang dilakukan oleh seorang diplomat, merupakan karya gabungan dari pemberian bakat, ditambah pelajaran dan dilengkapi dengan pengalaman¹⁸. Dengan kemampuannya berdiplomasi itulah akhirnya mampu membawa kemenangan RI atas Belanda, yaitu melalui pernyataan Roem-Royen yang dilanjutkan dengan diadakannya KMB sebagai pengakuan kedaulatan Belanda atas RI.

Setelah beliau tidak aktif lagi dalam dunia politik, Mohamad Roem mengisi waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang sosial keagamaan. Mohamad Roem aktif dalam dunia tulis menulis. Tulisannya tersebar dalam berbagai surat kabar maupun majalah, bahkan Mohamad Roem berhasil menyusun sebuah buku. Selain itu Mohamad Roem aktif pula mengikuti berbagai konferensi yang berkaitan dengan agama Islam di luar negeri. Jadi, selain

¹⁶ Ahmad Basuni, 1983 “*Mohamad Roem Negarawan Besar*”, Suara Muhammadiyah, No.22, Tahun ke-63, November 2, hlm. 19

¹⁷ Solichin Salam, 1984, “*Ulama Intelek*”, Panitia Buku Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 199

¹⁸ Soemarso Soemarsono, *op. cit.*, hlm. 117

berkecimpung di dunia politik, Mohamad Roem juga terjun dalam bidang sosial keagamaan. Namun, dalam skripsi ini tidak akan dibahas panjang lebar mengenai hal di atas karena dalam skripsi ini lebih ditekankan Mohamad Roem sebagai seorang diplomat ternama.

Sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain atau alat mekanik seperti telepon dan lain-lain yang mengetahui suatu peristiwa. Sumber sekunder adalah kesaksian dari kesaksian orang lain¹⁹.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa buku-buku. Buku-buku yang dijadikan sumber primer terutama buku yang berjudul *Bunga Rampai dari Sejarah* Jilid I Tahun 1972, *Bunga Rampai dari Sejarah* Jilid II Tahun 1977, *Bunga Rampai dari Sejarah* Jilid III Tahun 1983 yang disusun sendiri oleh Mohamad Roem dan diterbitkan oleh PT. Bulan Bintang Jakarta. Ketiga buku itu secara umum mengupas pengalaman-pengalaman Mohamad Roem dalam berbagai kegiatan politik yang terjadi di Indonesia, baik masa-masa sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya. Selain itu dalam buku itu juga terdapat tulisan-tulisan Mohamad Roem yang pernah dimuat dalam berbagai surat kabar dan majalah, maupun buku-buku biografi dari rekan-rekannya yang kemudian dikumpulkan menjadi satu. Meskipun demikian dari ketiga jilid buku tersebut belum ada yang memuat perjuangan Mohamad Roem dalam masa pendudukan Jepang, padahal Mohamad Roem memiliki peranan tersendiri dalam masa pendudukan Jepang.

¹⁹ Louis Gottschalk, 1986, *Mengerti Sejarah* (Terjemahan Nugroho Notosusanto), UI Press, Jakarta, hlm. 35

Buku karya Mohamad Roem yang lain adalah buku yang berjudul *Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI* yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia Jakarta tahun 1989. Buku itu menggambarkan kemampuan Mohamad Roem dalam berbagai bidang, seperti bidang diplomatik, politik-sejarah, agama, hukum, maupun bidang lainnya yang terangkum dalam bagian serba-serbi. Selain itu Mohamad Roem juga menulis sebuah buku yang berjudul *Suka Duka Berunding dengan Belanda*. Buku ini ditulisnya sendiri dan diterbitkan oleh Idayu Press, Jakarta tahun 1972. Buku ini menceritakan berbagai peristiwa penting yang dialami Mohamad Roem selama berunding dengan Belanda. Buku-buku karya Mohamad Roem di atas penting digunakan untuk membahas bab I sampai bab IV dalam skripsi ini.

Sedangkan buku yang lain yang digunakan sebagai sumber sekunder adalah buku yang disusun oleh Panitia Buku Peringatan Mohamad Natsir/Mohamad Roem dengan redaksi pelaksana Soemarso Soemarsono yang berjudul *Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*. Buku ini selain berisi masa muda Mohamad Roem dan perjuangannya di berbagai bidang, juga berisi sambutan-sambutan dari orang-orang yang mengenal Mohamad Roem secara dekat. Berbagai macam sambutan yang berasal dari orang-orang yang terkenal itu diharapkan akan mempermudah penulis untuk lebih mengenal watak dan kepribadian Mohamad Roem.

Untuk lebih membantu memahami Mohamad Roem, ada satu artikel yang ditulis oleh Fachry Ali yang berjudul *Mohamad Roem Diplomat Pejuang*. Artikel sebanyak 11 halaman ini berisi biografi Mohamad Roem beserta perjalanan hidup secara ringkas, tetapi cukup memberikan gambaran mengenai sosok Mohamad Roem. Sementara itu, buku yang berjudul *Sepuluh Orang Indonesia Terbesar*

Sekarang yang ditulis oleh ST Rais Alamsyah berbicara tentang siapa dan bagaimana Mohamad Roem, perjuangannya, maupun peranannya sebagai seorang diplomat yang mampu menghasilkan pernyataan Roem-Royen. Setidaknya buku ini cukup membantu menunjang penulisan skripsi ini. Selain itu buku yang ditulis oleh Iin Nur Insaniwati yang berjudul *Mohamad Roem, Karir Politik dan Perjuangannya (1919-1924)* yang juga membantu menunjang penulisan skripsi ini. Kemudian buku yang dikarang oleh Suratmin yang berjudul *Mohamad Roem Karya dan Pengabdianya* yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986. Buku ini mengupas mengenai karya serta pengabdian Mohamad Roem kepada bangsa Indonesia terutama dalam bidang politik. Suratmin juga menceritakan tentang kehidupan Mohamad Roem mulai dari masa mudanya sampai saat dimana Mohamad Roem mulai tampil menjadi seorang diplomat.

Sumber ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Selain itu penulis juga berharap dengan literatur ini dapat memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat menguasainya sebaik mungkin.

F. Kajian Teori

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "Mohamad Roem: Seorang Pejuang Diplomasi Indonesia (1946-1949)" perlu dikemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul dan tujuan skripsi yaitu:

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S Poerwadarminta, terbitan PN Balai Pustaka tahun 1982 halaman 723, *pejuang* dalam skripsi ini diartikan seorang yang berjuang. Dalam konteks ini, Mohamad

Roem adalah seorang pejuang bangsa, pejuang nasional, pejuang Islam yang gigih dan juga pejuang perunding yang tidak sedikit jasanya. Perjuangan Mohamad Roem yang dimaksud dalam skripsi ini terutama dititikberatkan pada perjuangan dalam bidang politik, yaitu melalui keikutsertaannya dalam berbagai perundingan dengan Belanda.

Diplomasi dapat diartikan sebagai keahlian dalam melakukan perundingan-perundingan antara bangsa-bangsa seperti dalam hal membuat perjanjian; urusan hubungan resmi antara dua negara; urusan tentang kepentingan suatu negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negara lain; kepandaian untuk menggunakan kata-kata secara tepat dalam perundingan agar dapat mencapai apa yang diinginkan.²⁰ *Diplomasi* juga diartikan kecakapan menggunakan perkataan yang samar-samar atau sangat berhati-hati dalam berunding, menghadapi orang lain, dan sebagainya.²¹ *Diplomasi* adalah urusan atau penyelenggaraan hubungan resmi antara negara dengan negara.²² Diplomasi merupakan bagian penting dalam sejarah Indonesia terutama dalam perjuangan untuk memperoleh kedaulatan secara penuh dari Belanda. Dalam mencari suatu langkah penyelesaian pertikaian dengan Belanda, diplomasi menjadi suatu senjata yang sangat ampuh, karena tanpa adanya kemampuan berdiplomasi, berbagai perundingan dengan Belanda tidak akan pernah terlaksana dengan baik. Mohamad Roemlah salah satu tokoh yang ada di balik semua perundingan-perundingan tersebut. Mohamad Roem sebagai seorang perunding (diplomat) memang menempati kedudukan yang khas

²⁰ J. S Badudu, 2003, *Kamus Kata.Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia*, .Kompas, Jakarta, hlm. 64

²¹ W.J.S Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, h lm. 723

²² *Ibid.*, hlm. 253

dalam sejarah negara Indonesia sehingga meskipun kegiatan perundingan-perundingan itu sudah sekaligus, termasuk dalam rangkaian perjuangannya masih perlu untuk mengemukakan bahwa Mohamad Roem sebagai perunding diberi tempat tersendiri secara khusus pula.²³

Diplomasi atau perundingan-perundingan yang dilakukan oleh seorang diplomat, merupakan karya gabungan dari pemberian bakat, ditambah pelajaran dan dilengkapi dengan pengalaman. Sebab diplomasi bukan hanya dilakukan secara resmi di belakang meja perundingan saja, tetapi termasuk juga runding-berunding secara tidak resmi dalam kesepakatan yang lebih leluasa.²⁴

Mohamad Roem yang memiliki kemampuan berdiplomasi, turut serta dalam perundingan-perundingan dengan Belanda. Hal itu dibuktikan dalam keikutsertaannya sebagai anggota delegasi dalam perundingan Linggajati, Renville, Roem-Royen dan KMB. Mohamad Roem pernah menjabat sebagai Ketua Delegasi dalam perundingan Roem-Royen tahun 1949 yang membuka jalan dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda yang kemudian menjadi dasar dilaksanakannya pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Diplomat dapat diartikan sebagai orang yang menyelenggarakan diplomasi, terutama menteri luar negeri dan para duta besar.²⁵ Keikutsertaan Mohamad Roem dalam perjuangan diplomasi Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai salah satu diplomat ulung yang dimiliki oleh Indonesia.

²³ Soemarso Soemarsono, 1978, *Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 115

²⁴ *Ibid.*, hlm. 118

²⁵ W.J.S Poerwadarminta, *loc. cit.*, hlm. 253

Berbekal pengalaman berpolitik dan sikapnya untuk selalu menghargai pendapat orang lain, meski berbeda dengan pendapatnya, menunjang keberhasilannya sebagai diplomat. Secara resmi ia mampu melakukan perdebatan dengan delegasi Belanda ketika terjadi selisih pendapat pada saat perundingan sedang berlangsung.

Selama perundingan Linggajati tanggal 13-15 November 1946, Mohamad Roem menjadi salah satu anggota delegasi RI yang menjadi perhatian khusus dari professor Schermerhorn yang tertuang dalam buku hariannya-kehadiran Mohamad Roem merupakan pribadi yang diterimanya. Tetapi setelah perundingan mulai berjalan barulah ia tahu bahwa Mohamad Roem seorang perunding yang bersemangat dan seringkali tidak mudah untuk dihadapi.²⁶

Dari batasan judul di atas maka maksud dari skripsi ini secara keseluruhan membahas tentang Mohamad Roem sebagai seorang pejuang diplomasi Indonesia yang dimulai dari latar belakang ia terjun ke dunia politik, peranan Mohamad Roem sebagai seorang diplomat hingga hasil yang diperolehnya sebagai seorang diplomat ternama. Batasan waktu yang dipilih antara tahun 1946-1949. Tahun 1946 merupakan tahun di mana Mohamad Roem melakukan kegiatan diplomasi yang pertama kali di awal kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pengakuan kedaulatan atas RI di mata dunia Internasional masih harus diperjuangkan. Sedangkan tahun 1949 merupakan tahun terakhir Mohamad Roem melakukan kegiatan diplomasinya, di mana pada tahun ini diselenggarakannya KMB untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Peranan Mohamad Roem sebagai diplomat ulung sangat besar. Salah satu hasil nyata dari

²⁶ *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid XIV*, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, hlm. 237

kemahirannya berdiplomasi adalah tercapainya pernyataan Roem-Royen yang membuka jalan ke arah Konferensi Meja Bundar.

G. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.²⁷ Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. Namun menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya Manajemen Penelitian menyatakan bahwa penelitian historis tidak perlu merumuskan hipotesis.²⁸ Walaupun demikian dalam penyusunan skripsi ini, penulis tetap menggunakan hipotesis sebagai pegangan dan arahan dalam membahas pokok yang akan diungkap.

Beberapa hipotesis yang akan penulis ajukan berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas adalah :

1. Oleh karena latar belakang keluarga, pendidikan dan keikutsertaan dalam organisasi politik maka Mohamad Roem terdorong untuk terjun ke dunia politik
Mohamad Roem terjun ke dunia politik dilatar belakanginya oleh beberapa faktor yakni dari keluarga, pendidikan, dan keikutsertaannya dalam organisasi politik mempengaruhi Roem untuk terjun menggeluti dunia politik di Indonesia.
2. Oleh karena peranannya dalam bidang politik maka Mohamad Roem mampu memperoleh posisi yang penting dalam meja perundingan dalam menegakkan kemerdekaan RI.

²⁷ Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Proyek Pengembangan LPTK, Jakarta, hlm. 64

Peranan politik Mohamad Roem dalam perang kemerdekaan antara lain sebagai anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Linggajati (1946), sebagai anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Renville (1947-1948), sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam perundingan Roem-Royen (1948), dan kemudian sebagai Wakil Ketua Delegasi Indonesia dalam KMB (1949).

3. Oleh karena kepiawaiannya dalam berdiplomasi maka Mohamad Roem mampu menghasilkan pernyataan yang dikenal dengan Pernyataan Roem-Royen. Mohamad Roem ditunjuk sebagai delegasi dari Indonesia karena kemampuannya dalam berdiplomasi sehingga dipercaya mampu membawa Indonesia menuju kemenangan.

H. Metode Penelitian

Untuk dapat menghasilkan suatu tulisan sejarah, seorang penulis sejarah harus menggunakan metode sejarah. Dan suatu penulisan sejarah hanya bisa dibangun oleh sejarawan apabila sejarah sebagai peristiwa itu meninggalkan jejak. Dengan demikian pelaksanaan penelitian dengan metode sejarah dilakukan dengan cara meninjau masalah dari perspektif yang sudah ada. Baru dari jejak-jejak sejarah itu dapat ditarik fakta sejarah yang akhirnya dipergunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau. Sedangkan metode sejarah itu sendiri adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.²⁹

²⁹ Louis Gottschalk, 1986, *Mengerti Sejarah (Terjemahan Nugroho Notokusanto)*, UI Press : Jakarta, hlm. 32

Menurut Louis Gottschalk ada empat langkah kegiatan dalam metode sejarah, yaitu ³⁰:

1. Pemilihan subyek untuk diselidiki.
2. Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subyek tersebut.
3. Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati tidaknya.
4. Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya dari sumber-sumber (atau bagian dari sumber-sumber) yang terbukti sejati.

Secara lebih terperinci Nugroho Notosusanto menguraikan langkah-langkah dalam metode sejarah, yaitu :

Tahap pertama adalah heuristik, yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang dikenal sebagai data-data sejarah. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literature yang terdapat di perpustakaan Universitas Sanata Dharma, perpustakaan UNY dan di berbagai tempat lain. Literatur tersebut berupa buku, jurnal pendidikan, maupun artikel surat kabar. Menurut Koentowidjojo, sumber data dibagi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari kesaksian seseorang secara langsung menyaksikan suatu peristiwa dengan panca inderanya sendiri. Sumber primer dapat disampaikan dalam bentuk tulisan yang ditulis oleh seseorang yang mengetahui peristiwa secara langsung. Sumber primer yang digunakan adalah buku karangan Mohamad Roem yang berjudul *Bunga Rampai dari Sejarah Jilid I-III*, dan *Suka Duka Berunding dengan Belanda*. Sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian yang disampaikan oleh seseorang yang tidak secara langsung menyaksikan suatu peristiwa. Sumber sekunder yang digunakan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 34

adalah buku karangan In Nur Insaniwati yang berjudul *Mohamad Roem Karir Politik dan Perjuangannya*, kemudian buku karangan Suratmin yang berjudul *Mohamad Roem Karya dan Pengabdianya*. Dan yang terakhir adalah buku karangan Soemarso Soemarsono yang berjudul *Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*.

Tahap kedua, yaitu kritik sumber. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan kritik sumber yang merupakan suatu tahap untuk melihat dan mengkaji tingkat otentisitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas (kebisaan dipercaya).³¹ Dalam penelitian sejarah hal itu sangat perlu dilakukan untuk menghindari adanya ketidakaslian atau kepalsuan dan adanya subyektifitas yang tinggi dalam suatu sumber.

Dalam penelitian sejarah terdapat dua kritik sumber yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah kritik sumber yang digunakan untuk menilai apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Pada umumnya kritik intern ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang didapat sehingga dapat memperoleh fakta yang jelas. Sedangkan kritik ekstern adalah kritik yang digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan. Kritik ini dilakukan dengan cara meneliti bahan yang digunakan, misalnya sifat bahan, gaya penulisan, bahasa yang dipakai dan jenis huruf yang digunakan.

Dalam penulisan skripsi ini kritik sumber yang dilakukan adalah kritik intern, sedangkan kritik ekstern tidak perlu dilakukan sebab keaslian sumber tidak perlu diuji kebenarannya. Dikatakan demikian karena data-data yang digunakan dalam skripsi ini berasal dari dokumen-dokumen yang sudah diuji kebenarannya. Kritik yang perlu dilakukan adalah kritik intern sebab kebenaran sumber data

³¹ Koentowidjojo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Benteng Budaya, hlm. 99-100

yang ada masih perlu diuji lagi kebenarannya, misalnya dalam penulisan tahun yang berbeda antara sumber yang satu dengan sumber yang lain. Hal ini dapat dimaklumi mengingat data-data yang diperoleh dari berbagai tempat ditulis oleh banyak orang sehingga banyak faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu perlu adanya perbandingan sumber agar dapat memperoleh sumber yang sesuai. Contoh kritik intern yang diperoleh yang memerlukan penjelasan, misalnya kata perjanjian dalam kalimat perjanjian Roem-Royen. Dalam buku-buku sejarah pada umumnya ditulis dengan kata perjanjian atau persetujuan, ada pula yang menulis pernyataan. Maka perlu untuk dilakukan perbandingan sumber sehingga di dapat kebenarannya.

Menurut Mohamad Roem penggunaan kata yang benar dalam peristiwa penting yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda tersebut adalah pernyataan bukan perjanjian atau persetujuan. Nama resmi dari peristiwa bersejarah tersebut adalah Pernyataan Roem-Roijen (*Roem-Roijen Statements*) di mana di dalamnya tiap pihak yaitu antara Indonesia-Belanda, masing-masing membuat pernyataan yang satu berbeda dengan yang lain. Dan masing-masing akan mengerjakan apa yang telah diterangkan, seperti orang melaksanakan persetujuan.³²

Tahap ketiga adalah interpretasi. Interpretasi atau sintesa, yaitu merupakan hal menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta sejarah yang diperoleh setelah ditetapkan kritik ekstern maupun kritik intern dari data-data yang berhasil dikumpulkan. Interpretasi disebut juga sebagai sudut pandang di mana didalamnya dilakukan analisis sumber yang bertujuan untuk mengurangi unsur subyektifitas dalam kajian sejarah. Sudut pandang dalam penulisan ini adalah mengkaji sisi Mohamad Roem sebagai seorang pejuang diplomasi

³² Mohamad Roem, 1977, *Bunga Rampai Sejarah Jilid II*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 43

Indonesia pada masa ketika Indonesia berjuang untuk memperoleh kedaulatannya dari Belanda.

Tahap ke empat yaitu historiografi atau penyajian³³, yaitu menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk karya sejarah. Historiografi dapat juga dikatakan merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah melalui proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.³⁴ Penulisan skripsi yang berjudul "Mohamad Roem: Seorang Pejuang Diplomasi Indonesia (1946-1949)" disusun berdasarkan urutan waktu kejadian, mulai dari tahun 1946 sampai tahun 1949. Tahun 1946 dipilih sebagai awal pembahasan karena pada tahun inilah Mohamad Roem melakukan kegiatan diplomasi yang pertama kali di awal kemerdekaan RI. Sedangkan tahun 1949 menjadi tahun terakhir Mohamad Roem melakukan kegiatan diplomasinya yang ditandai dengan diselenggarakannya KMB untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan RI. Adapun tema-temanya disusun secara sistematis mulai dari latar belakang kehidupan Mohamad Roem yang mempengaruhi hingga terjun ke dunia politik dan menjadi seorang diplomat sejati, peranan politik Mohamad Roem sebagai seorang diplomat ulung, serta hasil yang diperolehnya sebagai seorang diplomat dalam memperoleh kemerdekaan Indonesia.

I. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik. Pendekatan politik digunakan untuk melihat bagaimana perjuangan

³³ Nugroho Notosusanto, 1971, *Norma-Norma dalam Penelitian dan Penulisan Sejarah*, Dephankam, Jakarta, hlm. 19

³⁴ Sartono Kartodirdjo, 1989, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, PT.Gramedia, Jakarta, hlm. 70

Mohamad Roem dalam bidang politik dan pemerintahan, dimana di dalamnya Mohamad Roem banyak berperan pada perjuangan diplomasi Indonesia. Perjuangan diplomasi Indonesia yang diwujudkan dalam perundingan telah berperan besar pada tercapainya kemerdekaan dan kedaulatan penuh Indonesia dari Belanda. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa meskipun Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda belum mau melepaskan Indonesia sebagai daerah jajahannya. Berbagai upaya ditempuh guna mencari langkah penyelesaian, salah satunya melalui perundingan. Perundingan menjadi satu-satunya alternatif pilihan ketika pertempuran fisik tidak mampu lagi menjadi langkah penyelesaian masalah. Melihat situasi demikian, para pemimpin bangsa berusaha dengan berbagai cara untuk mencari langkah penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Para pemimpin Indonesia sadar bahwa tidak akan mudah berjuang melalui meja perundingan menghadapi Belanda, apalagi sikap Belanda yang selalu dingin dan arogan untuk diajak berunding. Mohamad Roem sebagai salah satu tokoh dibalik perundingan tersebut berusaha dengan segala kemampuan yang ia miliki untuk berjuang di meja perundingan menghadapi para diplomat Belanda. Kepercayaan penuh yang diberikan kepadanya tidak ia sia-siakan untuk memberi yang terbaik yang ia bisa kepada bangsanya. Hal itulah yang kemudian membuatnya dikenal sebagai seorang pejuang perunding. Tidak hanya itu saja, dalam bidang pemerintahan ia masih tetap dipercaya untuk menjabat posisi penting di beberapa kabinet.

Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan sosial. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaiman peranan Mohamad Roem sebagai seorang

diplomasi dan juga untuk melihat hasil perjuangan Mohamad Roem yang mampu membawa namanya sebagai seorang diplomat ternama dengan hasil karyanya yang dikenal dengan Pernyataan Roem-Royen itu.

J. Sistematika Penulisan

Penulisan tentang “Mohamad Roem: Seorang Pejuang Diplomasi Indonesia (1946 – 1949)” ini terdiri atas 5 bab:

- Bab I Berupa pendahuluan, memuat latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis, metode penelitian, pendekatan penelitian, sistematika penelitian.
- Bab II Berupa penjelasan latar belakang kehidupan Mohamad Roem hingga mampu terjun ke dunia politik Indonesia saat itu.
- Bab III Berupa penjelasan peranan Mohamad Roem sebagai seorang pejuang diplomasi dalam menegakkan kemerdekaan RI.
- Bab IV Berupa penjelasan hasil yang diperoleh Mohamad Roem ketika menjadi seorang diplomat ternama. Hasil-hasil itu dilihat dari perjuangannya dalam berdiplomasi untuk memperoleh pengakuan kedaulatan RI dari tangan Belanda.
- Bab V Kesimpulan, berisi jawaban-jawaban permasalahan yang ada dalam bab pendahuluan.

Demikianlah bab pendahuluan dalam penelitian ini. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini penulis ingin membuat suatu tulisan dengan menguraikan tentang Mohamad Roem: Seorang Pejuang Diplomasi

Indonesia (1946-1949). Untuk pembahasan permasalahan-permasalahan yang ada akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.



BAB II

**LATAR BELAKANG KEHIDUPAN MOHAMAD ROEM HINGGA
TERJUN KE DUNIA POLITIK**

Mohamad Roem merupakan tokoh yang jasa-jasanya tidak dapat diabaikan begitu saja. Keberhasilan Roem dalam menjalankan perundingan-perundingan menorehkan namanya dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai pejuang diplomasi yang ulung. Baginya, meja perundingan adalah senjata ampuh untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Mohamad Roem dikenal sebagai demokrat sejati. Hal ini tampak jelas terlihat dalam tema-tema perjuangannya yang tak lepas dari nilai-nilai luhur individual dan sosial. Sikap-sikap yang dimiliki oleh Mohamad Roem itu tidak terlepas dari peranan keluarga maupun pendidikan yang sangat mempengaruhi Roem dalam kehidupannya sehari-hari.

A. Masa-Masa Kecil hingga Remaja Mohamad Roem

Mohamad Roem lahir pada Sabtu Pahing, 16 Mei 1908 di desa Klewogan, Kawedanan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ia adalah anak ke enam dari tujuh bersaudara pasangan suami istri Dulkarnaen Djojomasmito (Lurah Desa Klewogan) dan Siti Tarbijah. Masa kecil Mohamad Roem dilewatkan di dua tempat, yakni Parakan (1908-1919) dan Pekalongan Jawa Tengah (1919-1924).¹

Masa kecil Mohamad Roem banyak dihabiskan di Parakan. Kota itu memberikan kenangan tersendiri bagi dirinya karena di kota inilah, Roem tinggal bersama

¹ Iin Nur Insaniwati, 2002, *Mohamad Roem Karir Politik dan Perjuangannya (1924-1968)*, Indonesiatara, Magelang, 2002, hlm. 1

nenek, ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Dalam kehidupan keluarga itu, nenek memegang peranan penting dalam keluarga, sedangkan sang ayah memegang peranan kedua. Dapat dikatakan bahwa nenek merupakan pendidik utama bagi anak-anak. Walaupun demikian, ayah bagi Mohamad Roem memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga Roem cenderung lebih tunduk kepada ayah daripada nenek. Sedang ibu Roem kurang memiliki peranan penting dalam keluarga itu.²

Selama Roem tinggal di Parakan, perkembangan kepribadiannya banyak dipengaruhi oleh sistem pengasuhan anak yang saling bertolak belakang antara nenek dan ayahnya. Di satu sisi, nenek Mohamad Roem menerapkan pola pengasuhan anak yang cenderung feodalistik, namun di sisi lain sang ayah menerapkan pola pengasuhan anak yang lebih demokratis, Meskipun demikian, sebagai seorang ayah sekaligus anak, Dulkarnaen Djojosasmito tidak pernah bersikap konfrontatif terhadap nenek Mohamad Roem yang menerapkan pola pengasuhan anak yang kurang demokratis.³

Kehidupan Roem bersama nenek, ayah, ibu, dan kakak terpaksa ditinggalkannya karena Parakan saat itu tengah dilanda wabah penyakit menular seperti kolera, pes, dan influenza sekitar tahun 1919. Roem dan adik perempuannya yakni Siti Chatijah kemudian tinggal bersama kakak perempuannya (Mutiah) di Pekalongan. Dan setahun kemudian, tepatnya di tahun 1920 ayah Roem meninggal dunia.⁴

² Soemarso Soemarsono, 1978, *Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 7

³ Iin Nur Insaniwati, *op. cit.*, hlm. 2

⁴ Somarso Soemarsono, *op. cit.*, hlm. 2

Setelah kepindahannya ke Pekalongan, Roem mengalami perubahan pada dirinya yang membawa dampak di kemudian hari terutama perkembangan kehidupan agamanya. Pada usia 11 tahun di Pekalongan Roem mengalami proses sosialisasi gerakan sosial Islam. Karena pada waktu itu H.O.S. Tjokroaminoto mencetuskan ide-ide tentang sosialisme Islam yang berpadu dengan semangat puritanisme Muhammadiyah. Semenjak Roem tinggal bersama kakak perempuannya Mutiah, Mohamad Roem sudah diperkenalkan dengan organisasi Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan kakak ipar Roem yakni Ranuwiharjo merupakan anggota organisasi Muhammadiyah yang juga menjadi tokoh Muhammadiyah di Pekalongan. Roem juga semakin memperdalam ilmu agamanya di bawah asuhan kakak iparnya itu. Pendidikan agama yang diperolehnya selama di Parakan dan di Pekalongan menjadi landasan yang fundamental dalam dirinya yang terkristal dalam pribadi muslim sejati. Landasan ini semakin kuat setelah Roem berkecimpung dalam JIB di bawah asuhan Haji Agus Salim.⁵

B. Latar Belakang Pendidikan Mohamad Roem

Mohamad Roem menempuh pendidikan formal pertamanya di Pendidikan Sekolah Desa (*Volkschool*) tahun 1915 selama dua tahun. Setelah dua tahun menempuh pendidikan di sekolah rakyat biasa kemudian Roem melanjutkan pendidikannya ke *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). Ia dapat masuk ke sekolah itu karena ayahnya yang seorang Lurah. Karena pada waktu itu ada syarat

⁵ Iin Nur Insaniwati, *op.cit.*, hlm.7

tertentu untuk dapat masuk ke sekolah tersebut, yaitu anak dari pegawai negeri atau yang lain dengan disertai sponsor yang menjaminkannya.⁶

Pendidikan HIS yang ditempuh Mohamad Roem diselesaikan di dua tempat, yakni di Temanggung (1917-1919) dan di Pekalongan (1919-1924). Seperti telah dikatakan sebelumnya, bahwa Pekalongan kemudian menjadi tempat kedua dalam menempuh pendidikan dasar karena di kota sebelumnya sedang terjangkit wabah penyakit menular sehingga Roem harus mengungsi. Mohamad Roem menempuh pendidikan HIS di Temanggung hanya sampai kelas III, selanjutnya ia menghabiskan pendidikan HISnya sampai lulus di Pekalongan tahun 1924.

Setelah lulus dari pendidikan HIS, Roem melanjutkan pendidikannya ke STOVIA (*School tot Opleiding van Indische Artsen*) di Jakarta. Pendidikan di STOVIA itu ditempuh selama 10 tahun dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian persiapan selama 3 tahun dan bagian *Geneeskundig* (Kedokteran) selama 7 tahun.⁷ STOVIA kemudian dihapuskan pada tahun 1927, suatu keuntungan bagi Roem karena ia dapat masuk ke STOVIA karena itu merupakan kesempatan terakhir. Setelah itu penerimaan untuk STOVIA dihentikan. Mohamad Roem kemudian menyelesaikan pendidikannya di AMS (*Algemene Middlebare School*) pada tahun 1927 setelah sebelumnya di tahun 1924 ia menyelesaikan pendidikannya di bagian persiapan di STOVIA.

Selama menempuh pendidikan di AMS, Roem tinggal di asrama yang bertempat di jalan Guntur Jakarta. Di sana ia tinggal selama 4 tahun, jadi selama 6

⁶ Soemarso Soemarsono, *op. cit.*, hlm. 4

⁷ *Ibid.*, hlm. 4

tahun (3 tahun di STOVIA, 3 tahun di AMS) Roem telah hidup dalam suasana kepanduan, dan suasana yang berbau politik, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan negara.⁸ Setelah tamat dari AMS Roem kemudian melanjutkan pendidikannya ke GHS (*Geneeskundige Hoogeschool*) selama dua tahun namun tidak berhasil lulus. Setelah dua kali gagal mengikuti ujian, Roem kemudian berhenti menjadi mahasiswa GHS. Kemudian pada tahun 1932, Mohamad Roem melanjutkan studinya ke RHS (*Rechts Hoogeschool*) di Jakarta setelah dua tahun sempat berhenti sekolah. Roem kemudian lulus menempuh pendidikannya di RHS pada tahun 1939 dan ia kemudian mendapat gelar “*Meester in de Rechten*” atau Sarjana Hukum. Semenjak lulus dari RHS ia kemudian memulai karirnya sebagai advokat yang membela rakyat kecil.

C. Latar Belakang Keikutsertaan Mohamad Roem dalam Organisasi Politik

Ketika Roem melanjutkan studinya ke STOVIA di Jakarta pada tahun 1924, Roem mulai mengenal dunia keorganisasian pemuda, seperti *Jong Java* (1924) dan *Jong Islamieten Bond* (1925) yang pada saat itu sedang berkembang di lingkungan STOVIA. Pada saat itu, organisasi yang berkembang di kalangan pemuda seperti *Jong Java* dan *Jong Islamieten Bond* bukanlah organisasi yang berkecimpung dalam bidang politik, namun melalui kedua organisasi inilah Mohamad Roem mulai berkenalan dengan dunia politik Indonesia. Dan karir politik Mohamad Roem pun juga diawali dari keikutsertaannya sebagai anggota di

⁸ Iin Nur Insaniwati, *op. cit.*, hlm. 8

Jong Java dan *Jong Islamieten Bond* yang kemudian dilanjutkan ke Partai Sarekat Islam Indonesia dan Gerakan Penyardar.

Jong Java sendiri berdiri pada 12 Juni 1918 yang merupakan kelanjutan dari Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia) dan merupakan organisasi pemuda Indonesia pertama yang bersikap netral dalam asas kebangsaan. Organisasi kepemudaan saat itu ditujukan bagi pelajar-pelajar sekolah menengah termasuk di STOVIA. *Jong Java* telah berkembang dan hidup di lingkungan STOVIA di mana saat itu Roem sedang menempuh pendidikan. Mohamad Roem adalah seorang pelajar yang berasal dari suku Jawa, maka secara otomatis harus masuk ke dalam keanggotaan *Jong Java*, sebab pada waktu itu pelajar-pelajar STOVIA harus masuk ke dalam organisasi pemuda yang sesuai dengan daerah asalnya.

Ketika Mohamad Roem masuk menjadi anggota *Jong Java* banyak kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu. Kemudian di tahun 1925 berdirilah organisasi *Jong Islamieten Bond* atau Pemuda Persatuan Islam. JIB memberikan kesempatan bagi Mohamad Roem untuk ikut dalam organisasi yang berasaskan Islam, agama yang telah diperdalam ketika ia masih tinggal di Pekalongan. Meskipun Roem masuk sebagai anggota JIB, namun keanggotaannya sebagai *Jong Java* tidak dilepaskan. Di JIB ini Roem lebih aktif melakukan kegiatan karena di JIB ini keanggotaannya bersifat terbuka bagi pemuda atau pelajar dari berbagai daerah yang beragama Islam. Di organisasi JIB inilah Mohamad Roem pertama kalinya berkenalan dengan Haji Agus Salim yang kala itu menjadi penasehat JIB.

Mohamad Roem sangat mengagumi sosok Haji Agus Salim. Karena terlalu dekatnya dengan Haji Agus Salim ibarat bersaudara sekandung. Hubungan yang dekat yang terjalin antara Roem dengan Haji Agus Salim sangat mempengaruhi langkah-langkah politik Roem di kemudian hari. Kedekatannya dengan Haji Agus Salim juga telah mendorongnya untuk bergelut dalam PSII dan Gerakan Penyardar yang juga dipimpin oleh Haji Agus Salim sendiri. Ketika Mohamad Roem masih menjadi anggota JIB, ia kemudian mulai tertarik terhadap partai politik terutama Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Hal ini juga tidak lain karena pengaruh dari Haji Agus Salim yang telah mendorongnya untuk ikut aktif dalam partai politik. Dengan masuk menjadi anggota PSII, secara tidak langsung Mohamad Roem kemudian mengenal tokoh-tokoh PSII, seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Abdul Muthalib Sangadji, serta mantan anggota JIB yang sudah menjadi anggota PSII, seperti Surowijono, Sjam-suridjal, dan Mohamad Sarjan.⁹ Setelah mengenal tokoh-tokoh tersebut akhirnya mendorong Mohamad Roem untuk masuk menjadi anggota PSII.

Secara resmi Mohamad Roem masuk menjadi anggota PSII pada tahun 1932. Ketika pada tahun 1936 PSII terpecah menjadi dua Mohamad Roem bersama Haji Agus Salim kemudian membentuk Barisan Penyardar PSII hingga akhirnya barisan ini berubah menjadi partai baru yang bernama Pergerakan Penyardar. Partai ini merupakan partai yang bersifat koperasi dengan Belanda, dalam arti bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus dicapai dengan radikal, tetapi dengan jalan perundingan. Mohamad Roem pun sadar setelah melihat

⁹ *Ibid.*, hlm. 22

pandangan Haji Agus Salim yang realistis. Bahwa penekanan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia harus diubah, yaitu dengan perundingan. Dan pengalaman yang diperoleh Mohamad Roem bersama Haji Agus Salim memberikan arah aktivitas politik Roem sebagai pejuang dan perunding.¹⁰

Gerakan Penyadar ini berdiri di tengah-tengah situasi Indonesia yang memburuk akibat penindasan terhadap gerakan kemerdekaan. Jangankan menyebut “merdeka”, sebutan “Indonesia” saja dilarang, terlebih dalam rapat-rapat anggota partai politik. Dan untuk memperoleh legitimasi politik serta landasan dalam aktivitasnya, maka Gerakan Penyadar ini mendukung petisi Sutarjo yang bermaksud meminta Belanda membicarakan soal berdirinya Hindia Belanda tersendiri. Dan untuk mewujudkan hal ini, maka Roem pun ikut berunding dengan Tjarda van Starckenborgh Stakhouwer, gubernur jenderal Belanda, mengenai masa depan Indonesia. Dalam perundingan itu, Agus Salim mengusulkan kesediaan rakyat Hindia membantu Belanda dalam Perang Dunia II, dengan syarat Indonesia merdeka. Sampai Indonesia merdeka, Tjarda tidak pernah memperhatikan usul itu. Ketika Jepang masuk tahun 1942, seluruh partai politik dibubarkan, termasuk Gerakan Penyadar.¹¹

Ketika partai politik pada waktu itu banyak yang dibubarkan akibat peraturan pemerintah Jepang saat itu, untuk sementara waktu Mohamad Roem tidak berkecimpung dalam dunia politik. Ia melanjutkan praktek sebagai pengacara. Pada akhir September tahun 1944, Mohamad Roem kembali aktif dalam dunia politik Indonesia. Dengan masuk ke dalam Barisan Pelopor. Ia

¹⁰ Yanto Bashri dan Retno Suffatni (ed.), 2005, *Sejarah Tokoh Bangsa, Mohamad Roem : Diplomat Pejuang oleh Fachry Ali*, Pustaka Tokoh Bangsa, hlm. 230

¹¹ *Ibid.*, hlm. 230

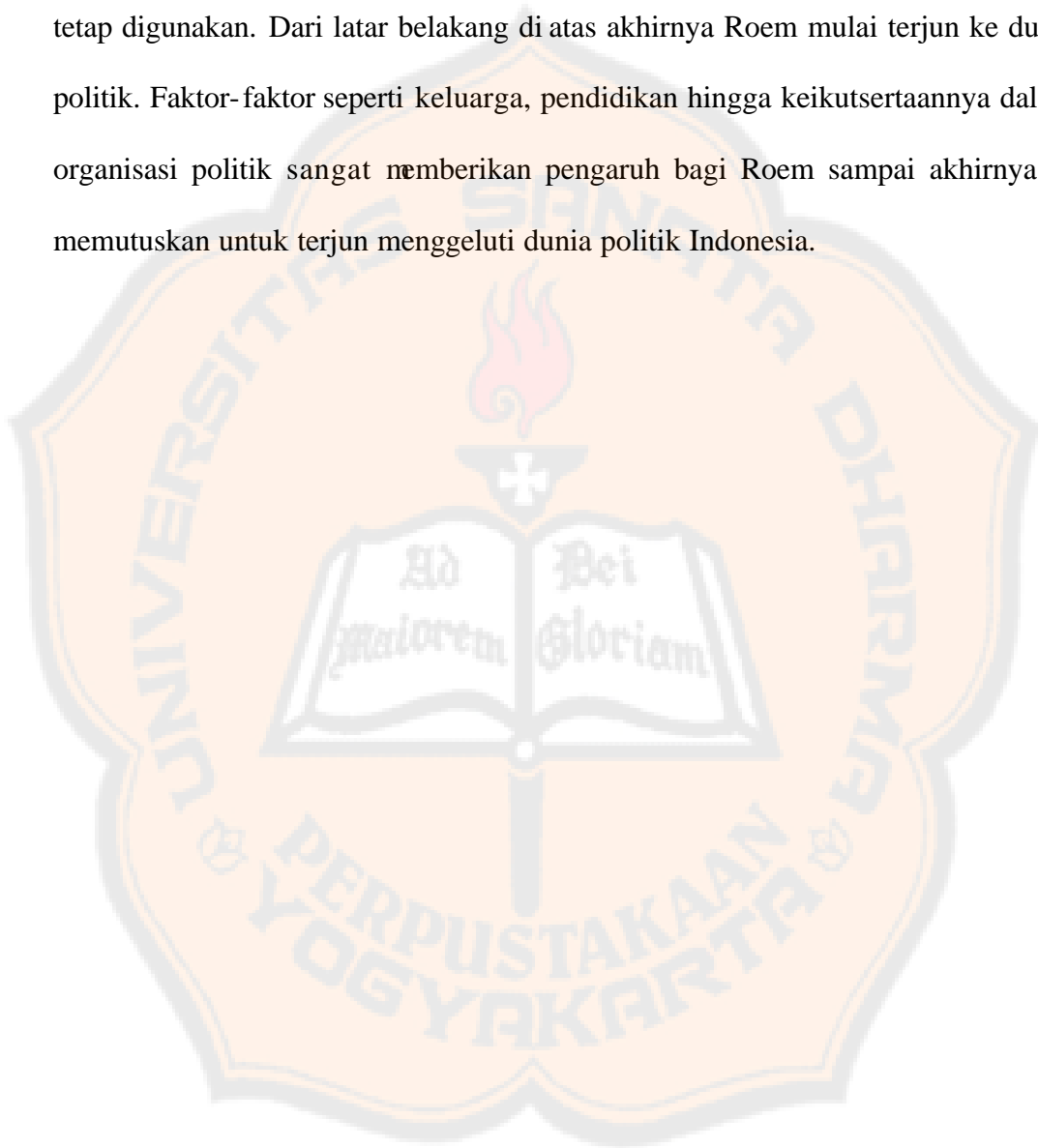
diangkat menjadi Kepala Barisan Pelopor Kampung Kwitang (kampung tempat tinggalnya). Dan ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, keanggotaan Mohamad Roem dalam Barisan Pelopor dilepasnya. Dan ketika Barisan Pelopor kemudian berubah menjadi Barisan Banteng Desember 1945, Mohamad Roem sudah tidak lagi menjadi anggota barisan itu.¹²

Pada tanggal 14 Oktober 1944 didirikan Barisan *Hizbullah* (Tentara Allah) dan Roem pun ikut aktif pula di dalamnya. *Hizbullah* sendiri merupakan organisasi khas Islam yang didukung oleh pihak Jepang, di samping organisasi lain yang memperoleh latihan militer seperti *Keibondan* (pertahanan sipil), *Seinendan* (Korps Pemuda) yang bisa dimasuki oleh kalangan pemuda Islam.¹³ Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, Barisan *Hizbullah* yang dibentuk di bawah Masyumi pun ikut dibubarkan begitu juga keterlibatan Mohamad Roem dalam organisasi ini pun ikut berakhir. Pada awal masa pendudukan Jepang, Mohamad Roem lebih banyak mencurahkan waktunya untuk berpraktek sebagai pengacara sesuai dengan pendidikan yang pernah ditempuhnya ketika di Sekolah Tinggi Hukum pada tahun 1939. Pada masa pendudukan Jepang, semua partai-partai politik yang ada pada waktu itu dibubarkan. Ketika Jepang merestui berdirinya Barisan Pelopor di bawah *Jawa Hokokai* dan Barisan *Hizbullah* di bawah Masyumi, barulah Mohamad Roem aktif kembali dalam dunia pergerakan nasional Indonesia. Dan setelah kemerdekaan, Mohamad Roem pun aktif kembali dalam bidang pemerintahan dan organisasi Masyumi. Masyumi

¹² Iin Nur Insaniwati, *op. cit.*, hlm. 31

¹³ Deliar Noer, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 28

pada masa awal kemerdekaan RI berbeda dan tidak memiliki hubungan apa pun dengan buatan Jepang. Masyumi pada masa awal kemerdekaan dibentuk dan didirikan oleh umat sendiri tanpa campur tangan pihak luar, meskipun nama lama tetap digunakan. Dari latar belakang di atas akhirnya Roem mulai terjun ke dunia politik. Faktor-faktor seperti keluarga, pendidikan hingga keikutsertaannya dalam organisasi politik sangat memberikan pengaruh bagi Roem sampai akhirnya ia memutuskan untuk terjun menggeluti dunia politik Indonesia.



BAB III

**PERANAN POLITIK MOHAMAD ROEM SEBAGAI PEJUANG
DIPLOMASI INDONESIA**

Ketika Mohamad Roem tumbuh sebagai pemuda, ia mulai tertarik untuk belajar berorganisasi melalui organisasi pemuda atau pelajar yang ada pada saat itu. Dan ia mulai belajar berorganisasi ketika ia melanjutkan studinya dari HIS di Pekalongan ke STOVIA di Jakarta 1924. Di STOVIA ia mulai mengenal dunia organisasi pemuda atau pelajar, seperti *Jong Java* (1924) dan *Jong Islamieten Bond* (1925) yang berkembang di lingkungan STOVIA. Meski kedua organisasi pemuda itu bukan organisasi politik namun melalui kedua organisasi pemuda itulah Mohamad Roem berkenalan dengan dunia perpolitikan Indonesia sehingga wajar bila karir politik Mohamad Roem diawali dari keanggotaannya dalam *Jong Java* dan *Jong Islamieten Bond* yang kemudian dilanjutkan dengan kiprahnya dalam Partai Sarekat Islam Indonesia dan Gerakan Penyardar.

A. Peranan Mohamad Roem sebagai Anggota Delegasi Indonesia dalam Perundingan Linggajati (1946)

Sebelum diadakan perundingan Linggajati terlebih dahulu diadakan perundingan pendahulu, yaitu perundingan Hoge Veluwe pada tanggal 14, 22, dan 24 April 1946 yang menuntut pengakuan *de facto* di Jawa, Madura, dan Sumatra. Namun perundingan ini menemui jalan buntu, hingga akhirnya dilanjutkan ke perundingan Linggajati pada tanggal 15 November 1946. Perundingan Linggajati

merupakan perundingan yang dilaksanakan oleh pihak Indonesia dan Belanda pada era Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946- 27 Juni 1947).¹ Dalam kabinet ini, Mohamad Roem memperoleh kepercayaan untuk menjabat sebagai menteri dalam negeri. Ia mulai terlihat sibuk ketika jabatan itu disandanginya, terlebih lagi ketika perundingan antara Indonesia dan Belanda dibuka kembali. Pada perundingan ini, Mohamad Roem turut sebagai delegasi Indonesia. Dalam perundingan ini peranan konkret dari Mohamad Roem adalah bahwa ia tidak hanya sebagai anggota delegasi tetapi ia juga adalah seorang menteri dalam negeri yang ikut memberikan suara. Dan ini terlihat dari reaksi-reaksi kerasnya menentang delegasi Belanda saat keduanya saling mengeluarkan pendapat masing-masing.

Dalam perundingan ini Belanda mengirimkan delegasinya yang diketuai oleh Profesor Willem Schermerhorn. Delegasi Schermerhorn berstatus Komisi Jenderal dan merupakan kompromi antara Partai van de Arbeid dan Partai Katolik dalam pembentukan Kabinet Belanda. Anggota-anggota Komisi Jenderal ialah Mr. F De Boer (liberal), Dr. Max van Poll (Partai Katolik) dan Dr. van Mook selaku Letnan Gubernur Jenderal untuk Hindia Belanda. Sedangkan delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir, terdiri dari Mr. Amir Syariffudin, Dr. A. K. Gani, Mr. Susanto Tirtoprodjo, Mr. Mohamad Roem, Dr. J. Leimena.² Perundingan ini membahas gencatan senjata kedua negara. Masing-masing delegasi kemudian membentuk Panitia Gencatan Senjata. Anggota Panitia

¹ In Nur Insaniwati, 2002, *Mohamad Roem Karir Politik dan Perjuangannya (1924-1968)*, Indonesiatara, Magelang, hlm. 14

² Soemarsono Soemarso, 1978, *Mohamad Roem 70 Tahun : Pejuang Perunding*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 125

Gencatan Senjata dari pihak Belanda antara lain adalah : 1) Prof. W. Schermerhorn, 2) van Mook, 3) Max Poll, dan 4) F. De Boer, sedangkan anggota dari Indonesia terdiri dari : 1) Perdana Menteri Sutan Sjahrir, 2) Menteri Dalam Negeri Mohamad Roem, 3) Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprodjo, dan 4) Menteri Negara Dr. Soedarsono. Perundingan ini diketuai oleh Lord Killern, seorang diplomat senior dari kerajaan Inggris, yang khusus diberi tugas untuk membantu kedua belah pihak.³ Hari-hari pertama persidangan dipimpin oleh perantara Lord Killern. Tetapi selanjutnya perundingan dilangsungkan secara resmi, antara Indonesia-Belanda sendiri. Setelah naskah persetujuan Linggajati di paraf oleh kedua belah pihak, delegasi Belanda pulang ke Nederland untuk melaporkan kepada pemerintahnya secara lengkap (26 November 1946-9 Januari 1947). Setelah itu persetujuan Linggajati ditandatangani oleh kedua pemerintahan secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947. Karena situasi yang memburuk mengenai tafsiran dari dan pelaksanaan Persetujuan Linggajati oleh Belanda dan oleh Indonesia, delegasi Belanda pulang lagi ke Nederland (24 Mei-12 Juni 1947), sehingga ancaman akan dilakukannya tindakan militer oleh Belanda semakin hari semakin kentara dengan nyata. Selanjutnya delegasi Belanda yang bernama Komisi Jenderal tersebut meninggalkan Indonesia sama sekali pada tanggal 30 Juli 1947, yakni setelah terjadinya agresi militer Belanda ke-I terhadap RI, yang berarti merobek-robek jiwa persetujuan Linggajati yang ada.⁴ Peranan Profesor Schermerhorn berakhir di sini, sedangkan peranan Sutan Sjahrir berakhir lebih dulu, yaitu pada tanggal 27 Juni 1947 ketika ia harus meletakkan jabatannya

³ Mohamad Roem, 1977, *Bunga Rampai dari Sejarah Jilid II*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 10

⁴ Soemarsono Soemarso, *op. cit.*, hlm. 126

sebagai Perdana Menteri dan menyerahkan mandat Kabinet Sjahrir III kepada Presiden. Peranan Mohamad Roem masih berjalan terus sebagai perunding menghadapi Belanda. Dia tampil tidak mewakili partainya melainkan sebagai perseorangan akan tetapi setelah terjadi agresi Belanda ke-I menjadi mewakili partai Masyumi secara resmi, disebabkan karena waktu itu Masyumi mulai turut masuk dalam Kabinet Amir Syarifuddin (13 November 1947).⁵ Ketika turut serta berperan dalam perundingan Linggajati, rupanya Mohamad Roem menunjukkan corak tersendiri. Dan hal ini mulai disadari pula oleh Prof. Schermerhorn sendiri ketika bersama-sama berunding dalam perundingan Linggajati itu. Dalam catatan-catatan yang ditulis oleh Prof. Schermerhorn, dikatakan bahwa Mohamad Roem merupakan seorang perunding yang bersemangat dan seringkali tidak mudah menghadapinya. Sikapnya ini terlihat jelas ketika dalam perundingan, Schermerhorn mencoba memperkenalkan delegasinya dengan sebutan Komisi Jenderal dan bukan sebagai delegasi Belanda. Sebutan Komisi Jenderal dimaksudkan agar delegasi RI mengetahui bahwa Komisi Jenderal memiliki mandat terbatas. Mendengar hal itu dengan reaksi cepat Mohamad Roem melontarkan kritikan tajam bahwa menurutnya sebutan delegasi harus tetap dipakai oleh pihak Belanda seperti yang selama ini dipakai. Schermerhorn menangkis, bahwa sebutan yang sebelumnya merupakan suatu kekeliruan, dan kekeliruan tersebut kini diperbaiki sesuai dengan batas-batas Konstituante Belanda, yakni sebutan Komisi Jenderal.

⁵ *Ibi.*, hlm. 126

Perdebatan ini baru bisa diredakan setelah ada usul dari van Poll yang menyatakan agar delegasi Belanda disebut “ *The Commission General as Netherland’s Delegation*”. Mengenai kejadian perdebatan ini, Schermerhorn menamakan Mohamad Roem mulai “meronta-kuda” (*Roem begon hiertegen te steigen*).⁶ Dalam perundingan-perundingan selanjutnya, pihak Belanda menginginkan kehadiran wakil-wakil dari daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera sehubungan dengan pembicaraan tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera. Terhadap keinginan pihak Belanda tersebut, Mohamad Roem secara tegas mengemukakan suatu gambaran bahwa RI juga tampil mewakili daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera (yang masih dikuasai Belanda, dan atau mendirikan pemerintahan masing-masing dengan dorongan Belanda).⁷

Terhadap pernyataan Roem tersebut, pihak Belanda menolaknya dengan keras sehingga menimbulkan perdebatan yang berlangsung lama. Sidang terpaksa ditangguhkan. Setelah penangguhan itu, sidang-sidang berikutnya dengan sengaja tidak melanjutkan pembicaraan mengenai masalah tersebut secara khusus, sebagai suatu kebijaksanaan untuk melancarkan sidang-sidang berikutnya.⁸ Kemudian pada tanggal 24 Oktober 1946 diadakan perundingan di kantor Komisi Jenderal di Jakarta. Perundingan itu dihadiri oleh Sutan Sjahrir, Amir Syarifuddin, A.K Gani dan anggota pengganti J. Leimena. Saat perundingan itu, Mohamad Roem sedang pergi ke Yogyakarta, sehingga posisinya digantikan oleh anggota pengganti J. Leimena sedangkan perundingan saat itu dipimpin oleh Sutan Sjahrir.

⁶ *Ibid.*, hlm. 127

⁷ Iin Nur Insaniwati, *op. cit.*, hlm. 62

⁸ Soemarso Soemarsono, *op. cit.*, hlm. 127

Perundingan itu memberikan kesan puas bagi kedua belah pihak. Persidangan kembali digelar pada hari Senin tanggal 4 November 1946 di Jakarta. Schermerhorn kembali berhadapan dengan Mohamad Roem. Masalah yang dibahas kali ini menyangkut wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda. Mohamad Roem menginginkan wilayah-wilayah yang diduduki Belanda harus kembali kepada kekuasaan Republik Indonesia apabila persetujuan ini telah tercapai. Mengenai masalah ini, akhirnya van Mook memberikan perubahan dengan menyisipkan kata “sementara” untuk kalimat “wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda”, sebagai perkecualian bagi *de facto* Belanda terhadap Republik.⁹

Pada sidang berikutnya, pihak Belanda mengusulkan agar perundingan yang akan berakhir pada 15 November 1946 ditutup oleh Lord Killern. Mohamad Roem kembali mengemukakan reaksinya. Atas reaksi Mohamad Roem tersebut, Schermerhorn menulis sebagai berikut: “Roem menjadi sangat galak dan membandel, kemudian berkata bahwa hal tersebut adalah sangat tidak tepat, karena yang berunding toh hanya pihak Belanda dan Indonesia, dan bukan pihak lain sama sekali. Saya pun menjadi berang dan mengatakan kepadanya, bahwa masalah ini sudah disetujui bersama Soekarno, dan karena itu semata-mata menjadi urusan intern Indonesia sendiri, tidak lagi menjadi urusan kami.”¹⁰ Ketegangan ini pun berakhir ketika Amir Syarifuddin menunjukkan searik kertas yang berisi catatan tentang pembicaraan Schermerhorn dengan Presiden Soekarno yang menguntungkan pendirian ketua delegasi Belanda tersebut.

⁹ *Ibid.*, hlm. 129

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 129

Pada sidang 15 November 1946 direncanakan sidang akan berjalan singkat, yakni hanya acara penandatanganan persetujuan yang tercapai di Linggajati antara Belanda dan RI. Namun sidang terpaksa berjalan tidak secepat yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh serangan dari Mohamad Roem terhadap pasal 1. Menurutnya pasal 1 dari persetujuan itu kurang tepat, sebab penyerahan kekuasaan wilayah yang diduduki Belanda dan Sekutu dirumuskan dengan pengertian *de jure*, padahal yang dimaksud hanya kekuasaan *de facto*.¹¹ Schermerhorn menerima usulan Mohamad Roem dengan nada keras, karena menurutnya persoalan itu tidak dapat diselesaikan secara singkat dalam sidang yang hampir selesai. Dengan adanya serangan dari Mohamad Roem itu, akhirnya sidang terpaksa diskors untuk mendinginkan suasana.

Mengenai usul tersebut, sebetulnya Mohamad Roem sudah menuangkan dalam bentuk tulisan di atas searik kertas berwarna merah jambu yang nantinya akan disampaikan kepada Schermerhorn di persidangan hari pertama (13 November 1946). Dan kertas merah jambu tersebut sebenarnya telah diserahkan kepada Schermerhorn pada akhir persidangan ketika ia sudah beranjak dari tempat duduknya untuk meninggalkan ruang sidang. Namun saat itu Schermerhorn mengatakan kepada Mohamad Roem agar kertas itu diserahkan saja kepada rekannya yang bernama Samkalden. Akan tetapi ternyata Samkalden sengaja tidak menyerahkan kertas itu kepada Schermerhorn, sehingga ketika sidang berakhir masalah itu ditanyakan oleh Mohamad Roem, Schermerhorn mengatakan tidak

¹¹ Iin Nur Insaniwati, *op. cit.*, hlm. 63

tahu apa-apa.¹² Dan ketika hal itu ditanyakan kepada Samkalden, ia mengatakan tidak ingat menyimpan kertas itu.¹³ Untuk mendinginkan suasana di sidang yang panas itu, akhirnya Ketua Delegasi RI mengusulkan agar pembicaraan-pembicaraan pada hari itu tidak dicantumkan dalam notulen. Usul Sjahrir dengan senang hati diterima Schermerhorn dan dipuji sebagai langkah-langkah yang bijaksana.

Di perundingan Linggajati, inilah Roem mulai berperan dan ikut serta dalam dunia diplomatik. Naskah persetujuan Linggajati ini akhirnya mencapai persetujuannya dan diparaf oleh ketua delegasi masing-masing pada 15 November 1946. Sebelum persetujuan ini diratifikasi oleh KNIP, maka di mana-mana diadakan rapat-rapat umum untuk memberikan penjelasan kepada rakyat. Naskah Linggajati itu terdiri atas 17 pasal, yang didalamnya dinyatakan antara lain, pengakuan pemerintah Belanda atas Republik di Jawa, Madura, dan Sumatera. Akan dibentuk pemerintahan Indonesia-Serikat, dan akan diadakan hubungan Uni antara Indonesia-Belanda dan lain-lain.¹⁴ Dalam perkembangannya, Parlemen Belanda lebih dulu menyetujui naskah Linggajati, yakni pada 20 Desember 1946, sedangkan KNIP baru menyetujui naskah tersebut pada 5 Maret 1947. Jangka waktu yang cukup panjang tersebut disebabkan adanya berbagai tanggapan yang bersifat pro dan kontra dari berbagai golongan masyarakat.

Dengan dicapainya persetujuan oleh kedua belah pihak, itu belum berarti bahwa persetujuan itu bisa terus dilaksanakan. Persetujuan itu baru bisa

¹²Soemarso Soemarsono, *op. cit.*, hlm. 131

¹³*Ibid.*, hlm. 131

¹⁴St. Rais Alamsyah, 1952, *Sepuluh Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Mutiara, Jakarta, hlm.

dilaksanakan bila telah mendapat ratifikasi dari parlemen masing-masing, untuk RI KNIP. Baik Parlemen Belanda maupun KNIP tidak begitu saja mau menerima persetujuan yang telah dicapai oleh pemerintah negara masing-masing. Parlemen Belanda baru memberikan persetujuannya setelah berhasil diyakinkan bahwa persetujuan itu bersifat sementara, jadi masih akan diadakan pengaturan lebih lanjut yang menyangkut hubungan Belanda dan Indonesia, tetapi juga merupakan hal maksimal yang dapat dicapai pada waktu itu. Ini disebabkan karena golongan konservatif yang takut kehilangan Indonesia kuat suaranya dalam parlemen. Sementara itu KNIP juga tidak segera bersedia memberikan pengesahannya atas perjanjian Linggajati, karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda dan tidak sesuai dengan tuntutan perjuangan bangsa Indonesia yang menghendaki kemerdekaan Indonesia 100%. Partai yang begitu keras menentang perjanjian Linggajati ialah Masyumi, PNI, dan pengikut Tan Malaka (Persatuan Perjuangan).¹⁵

Dari kelompok-kelompok partai yang menolak rencana persetujuan Linggajati tersebut terlihat bahwa partai Mohamad Roem sendiri, yaitu Masyumi, ternyata juga ikut menolak rencana persetujuan tersebut. Pada peristiwa ini, kedudukan Roem, Natsir, Sjafruddin dan yang lainnya dalam kabinet mendapat kritik, sebab mereka sebagai anggota pemerintah menyetujui persetujuan Linggajati, sedangkan partainya secara prinsipil tidak menyetujui.¹⁶ Keadaan tersebut juga menimbulkan ketidakserasian hubungan antara pemimpin Masyumi (yang pada waktu itu dipegang oleh Dr. Sukiman) dan rekan-rekannya yang

¹⁵ G.Moedjanto, 1988, *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 183

¹⁶ St. Rais Alamsyah, *op. cit.*, hlm. 55

duduk dalam kabinet. Namun keadaan ini dapat didamaikan hingga perpecahan dalam partai tidak terjadi, yaitu dengan adanya pernyataan dari anggota partai Masyumi yang duduk dalam kabinet termasuk Mohamad Roem bahwa kabinet bersifat nasional bukan koalisi. Dengan demikian, kedudukan para menteri Masyumi dalam kabinet adalah bukan atas nama partai melainkan nama pribadi. Pernyataan itu akhirnya diterima oleh partai Masyumi sebagai upaya menjaga keutuhan partai.¹⁷

Rencana persetujuan Linggajati akhirnya dibawa ke sidang pleno KNIP (25 Februari 1947) untuk mendapatkan ratifikasi atau pengesahan. KNIP melalui sidang-sidang yang cukup sulit akhirnya memutuskan untuk memberikan ratifikasi terhadap rencana persetujuan Linggajati pada 5 Maret 1947. Dengan adanya ratifikasi KNIP tersebut, pemerintah dapat menandatangani persetujuan Linggajati yang berlangsung pada 25 Maret 1947 di Istana Negara Jakarta. Persetujuan ini meliputi pokok-pokok sebagai berikut : 1). pengakuan *de facto* oleh Belanda terhadap kekuasaan RI di Jawa, Madura, dan Sumatera, 2). pengakuan terhadap RI sebagai salah satu negara dalam RIS yang akan dibentuk, 3). pembentukan Uni Indonesia-Belanda yang akan dikepalai oleh Ratu dari kerajaan Belanda.¹⁸ Akibat dari perundingan itu, RI diakui secara *de facto* oleh beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, sedangkan negara-negara Arab mengakui RI secara *de jure* atas inisiatif sendiri.¹⁹ Pengakuan ini berarti pengakuan atas peralatan-peralatan RI, yaitu Hubungan Luar Negeri

¹⁷ Iin Nur Insaniwati, *op. cit.*, hlm. 66

¹⁸ Susanto Tirtoprodjo, 1963, *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, hlm. 24-25

¹⁹ Mohamad Roem, 1977, *Bunga Rampai Jilid II*, hlm. 14

dan Angkatan Bersenjata. Meskipun persetujuan Linggajati kemudian tidak diakui lagi oleh Belanda, pengakuan dari negara-negara lain tidak dapat dicabut kembali.

B. Peranan Mohamad Roem sebagai Anggota Delegasi dalam Perundingan Renville (1947-1948)

Setelah persetujuan Linggajati selesai ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Belanda, ternyata dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Hambatan ini bersumber pada perbedaan penafsiran masing-masing pihak terhadap isi persetujuan tersebut.

Perbedaan penafsiran itu tak lain adalah mengenai kedudukan Republik Indonesia Serikat (RIS), dimana pihak Belanda ingin mempertahankan bahwa ia tetap berkedudukan sebagai pemegang kedaulatan *de jure* sehingga yang berhak membentuk RIS itu adalah Belanda sendiri, sedangkan RI menafsirkan hanya boleh "*cooperate*" yang berhak diartikan sebagai "membantu" dalam pembentukan itu. Sebaliknya, pihak RI menafsirkan "*cooperate*" sebagai kerjasama, sehingga RIS dibentuk bersama-sama pula oleh Belanda dan RI.²⁰ Pada masa Kabinet Amir I, pihak Belanda mengajak RI membentuk "*gendarmarie*", yakni suatu badan kepolisian bersama antara RI dan Belanda. Menurut usul itu *gendarmarie* tersebut mempunyai wewenang di dalam wilayah RI dan pimpinan serta pasukan kepolisiannya harus terdiri dari wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Usul yang sebetulnya dimaksudkan untuk meniadakan

²⁰ Iin Nur Insaniwati, *op. cit.*, hlm. 68

kekuasaan RI di dalam wilayahnya sendiri ditolak oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin sehingga hubungan antara RI dan Belanda kembali menegang.²¹

Ketegangan kembali muncul antara Indonesia dengan Belanda, pihak Belanda secara sepihak menyatakan tidak terikat terhadap persetujuan Linggajati dan memutuskan untuk melakukan agresi militer yang mereka sebut dengan aksi polisional. Agresi militer tersebut dilaksanakan secara besar-besaran pada 21 Juli 1947. Akibat kegagalan pada perundingan pendahulu yakni perundingan Linggajati maka untuk memperoleh kesepakatan diadakan perundingan lagi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Untuk perundingan selanjutnya telah disepakati bahwa perundingan akan dilaksanakan di suatu tempat yang berkedudukan netral bagi kedua belah pihak, yakni di atas kapal Renville milik Amerika Serikat yang waktu itu sedang berlabug di dekat Shanghai. Pada 2 Desember 1947 kapal Renville telah sampai di Tanjung Priok.²² Perundingan antara RI dan Belanda di atas kapal Renville dimulai pada 8 Desember 1947.²³ Delegasi Belanda terdiri dari Abdulkadir Widjoatmodjo, Jhr. van Vredeburch, Dr. Soumokil, Pangeran Kertanegara dan Zulkarnain. Delegasi RI terdiri dari Mr. Ali Sastroamidjojo, Dr. Tjoa Siiek Ien, Mr. Mohamad Roem, Haji Agus Salim, Mr. Nasrun, dan Ir. Juanda.

Di sini tercantum nama Mohamad Roem sebagai anggota delegasi RI. Sebagai catatan keikutsertaan Mohamad Roem dalam perundingan Renville bukan atas nama pribadi seperti halnya dalam perundingan Linggajati, melainkan atas

²¹ *Ibid.*, hlm. 68

²² Drs.G.Moedjanto,M.A, 1988, *Indonesia Abad Ke-20 Jilid II*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 19

²³ George Mc Turman Kahin, 1991, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terj. Nin Bakdi Sumanto, UNS Press, Surakarta, hlm. 283

nama partai Masyumi. Hal ini bisa terjadi sebab Masyumi yang semula menolak untuk bekerjasama dengan Kabinet Amir Sjarifuddin I, akhirnya bersedia duduk dalam kabinet ini setelah kabinet ini melakukan reshuffle (perubahan susunan).²⁴ Kabinet Amir Sjarifuddin I yang telah mengalami perubahan (mengingat Belanda baru saja melancarkan agresi militernya sehingga diperlukan kabinet yang kuat. Oleh karena itu, Amir Sjarifuddin kemudian membentuk Kabinet Amir Sjarifuddin II, yang saat itu Masyumi bersedia turut serta dalam kabinet tersebut.)²⁵ memberikan 5 kursi kepada Masyumi, salah satunya adalah kementerian dalam negeri dipegang oleh Mohamad Roem. Dengan demikian, dalam Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947-29 Januari 1948) Mohamad Roem duduk sebagai menteri dalam negeri dan turut serta sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan Renville.

Perundingan Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 1948 yang ditandai dengan penandatanganan persetujuan Renville. Dalam perundingan tersebut disepakati bahwa Belanda tetap berdaulat atas Indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada RIS yang segera dibentuk, tetapi meskipun demikian Belanda dapat menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada suatu pemerintahan federal sementara sebelum RIS dibentuk. Selain itu, yang disepakati bahwa RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat akan menjadi peserta sejajar dengan kerajaan Belanda dalam Uni Nederland Belanda dengan Raja Belanda sebagai kepala negaranya, kemudian RI

²⁴ Iin Nur insaniwati, *op. cit.*, hlm. 70

²⁵ Soemarso Soemarsono, *op. cit.*, hlm. 136

akan menjadi negara bagian RIS dan dalam jangka waktu 6 bulan dan selambat-lambatnya itu supaya diadakan pemilu untuk membentuk Dewan Konstitusi RIS.²⁶

Dalam pelaksanaannya, perundingan ini ternyata tetap memiliki hambatan seperti perundingan-perundingan sebelumnya karena pada umumnya perundingan ini ditolak oleh sebagian rakyat Indonesia karena dengan adanya persetujuan ini semakin memperlemah kedudukan RI dan semakin memperkecil wilayah RI. Beberapa partai termasuk Masyumi juga ikut menolak persetujuan ini dengan menarik menteri-menterinya yang duduk dalam kabinet.²⁷ Selain partai Masyumi, ternyata penolakan juga datang dari partai PNI. Akibat penolakan dan tuntutan pembubaran Kabinet Amir Sjarifuddin yang dilakukan dua partai besar dalam kabinetnya, yaitu PNI dan Masyumi, maka tidak ada jalan lain bagi Amir selain menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden pada tanggal 23 Januari 1948.

Setelah dibubarkannya Kabinet Amir pada tanggal 23 Januari 1948 kemudian tanggal 29 Januari 1948 terbentuk kabinet yang baru sebagai pengganti. Kabinet yang baru ini dipimpin oleh Mohammad Hatta dan kabinetnya disebut dengan Kabinet Hatta I. Kabinet ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar karena harus menanggung konsekuensi persetujuan Renville yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Selanjutnya atas prakarsa KTN, perundingan antara RI dan Belanda dimulai kembali pada pertengahan Maret 1948. Kabinet ini menunjuk Mohamad Roem sebagai ketua delegasi, sedang wakilnya adalah Mr. Ali Satroamidjojo dan Mr. Latuharhary dan beberapa anggota yang lain seperti

²⁶ Deliar Noer, 1987, *Partai Islam dalam Pentas Nasional*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 165

²⁷ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 175

Dr. Tjoa Siek Ien, Mr. Nasrun, Prof. Dr.Supomo, serta Prof. Mr.Sunario Kolopaking.²⁸

Sebagai ketua delegasi RI, Mohamad Roem dalam memimpin harus bekerja keras mengatur taktik dan siasat dalam menghadapi Belanda. Mohamad Roem harus memikul tanggung jawab yang sangat berat yang telah diberikan oleh pemerintah RI. Ia harus berusaha dengan segala kemampuan, kecakapan dan kepandaiannya untuk mencapai kemerdekaan penuh seperti yang telah diperjuangkan bangsa Indonesia sejak dulu. Mengingat perundingan Renville sangat merugikan pihak Indonesia dibandingkan dengan persetujuan Linggajati maka mau tak mau Indonesia terpaksa menerima. Di sini Mohamad Roem dituntut untuk mempertahankan wilayah RI yang terlanjur berkurang agar tidak semakin sempit. Inilah peranan konkret Mohamad Roem dalam perundingan Renville. Di samping ia menjabat sebagai ketua delegasi RI atas usulan dari Mohammad Hatta, ia juga menjabat sebagai menteri dalam negeri.

Dalam perkembangannya, perundingan antara pihak RI dan Belanda menemui jalan buntu. Hal itu bersumber pada perbedaan pendapat mengenai Pemerintah Federal Sementara Belanda berpendapat bahwa pemerintah itu harus dipimpin wakil tinggi mahkota Belanda, sedangkan RI berpendapat bahwa Pemerintah Ferderal Sementara harus bersifat nasional jadi harus terdiri dari orang Indonesia saja. Sedangkan perbedaan lain bersumber pada masalah hubungan luar

²⁸ A.H Nasution, 1976, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VII: Peride Renville*, Disjarah AD dan Angkasa, Jakarta, hlm. 11

negeri RI dengan negara-negara lain. Belanda menuntut penghapusannya sedangkan RI tetap mempertahankannya.²⁹

Untuk mengatasi ketegangan itu, anggota KTN yaitu Du Bois wakil dari AS dan Critchley wakil dari Australia pada Juni 1948 membuat suatu nota untuk kedua delegasi berkaitan dengan cara mempercepat pelaksanaan pemilihan untuk menentukan daerah tiap-tiap negara bagian.³⁰ Pihak RI sebetulnya bersedia menerima nota tersebut, tetapi pihak Belanda menolak untuk merundingkannya bahkan menuduh wakil AS dan Australia bertindak melampaui wewenangnya, apalagi anggota KTN yang ketiga (Belgia) tidak ikut serta.³¹ Hal ini mengakibatkan macetnya perundingan di antara kedua belah pihak. Dalam situasi tersebut Belanda justru melakukan blokade ekonomi yang bertentangan dengan persetujuan Renville. Akibatnya RI mengalami defisit dan inflasi.

Kondisi bertambah semakin parah ketika kelompok kiri yang bergabung dengan PKI MUSO dan dikepalai oleh bekas Perdana Menteri Amir Sjarifuddin mengadakan perebutan kekuasaan (*Coup d'etat*) di Madiun pada 18 September 1948.³² Pemberontakan ini semakin memperlemah kedudukan RI khususnya dalam bidang militer. Dengan kondisi yang lemah seperti ini, Belanda menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan agresinya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948.

Dalam agresinya secara mendadak Belanda menyerang Yogyakarta yang kala itu adalah ibukota RI. Maguwo dan sekitarnya dihancurkan dengan bom,

²⁹ Tirtoprodjo, *op. cit.*, hlm. 26

³⁰ Iin Nur Insaniwati, *op. cit.*, hlm. 74

³¹ Mohammad Hatta, 1978, *Memoir*, Tintamas, Jakarta, hlm. 527

³² Drs.G.Moedjanto, MA, *op. cit.*, hlm. 27

kemudian Belanda mendaratkan pasukannya dan menduduki kota Yogyakarta. Belanda kemudian menawan Presiden dan Wakil Presiden, beberapa menteri dan tokoh-tokoh politik seperti Sutan Sjahrir, Ki Hadjar Dewantara, Nazir Pamuntjak, Mr. Mohamad Roem, Mr. Assat, dan Mr. A.K Pringgodigdo, Komodor Surjadarma, Komisaris Besar Polisi Soemarto, Prof. Dr. Asikin Widjojo Kusuma, serta Mr. Ali Sastroamidjojo untuk diasingkan ke Bangka dan Prapat.³³ Dengan melancarkan agresinya Belanda berharap bisa menjatuhkan kota Yogyakarta dan sekaligus juga dapat menyingkirkan para pemimpinnya sehingga RI dengan mudah dapat dilenyapkan.

Rencana yang telah dilakukan Belanda tersebut ternyata meleset karena sebelum pemimpin RI ditawan, Presiden Soekarno sempat mengirim radiogram kepada Menteri Kemakmuran Sjarifuddin Prawiranegara yang sedang mengadakan perjalanan ke Sumatera. Di dalam radiogram tersebut dikatakan bahwa Soekarno memberikan kekuasaan untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI). Presiden Soekarno juga sudah menyiapkan rencana jika PDRI tidak dapat dilaksanakan, maka ia memerintahkan Soedarsono, Palar, dan Maramis yang berada di New Delhi untuk membentuk pemerintahan pelarian atau *exile government*.³⁴

Kemudian pada tanggal 22 Desember 1948 Presiden Soekarno bersama menteri luar negeri Haji Agus Salim serta Sutan Sjahrir dipindahkan ke Prapat, sementara itu Wakil Presiden Mohammad Hatta, Mr. Assat, Mr. A.K. Pringgodigdo dan Komodor Surjadarma dipindahkan ke Bangka di daerah

³³ Iin Nur Insaniwati, *op. cit.*, hlm. 75

³⁴ Mohamad Roem, 1989, *Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI*, Gramedia, Jakarta, hlm. 60. Lihat juga Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 42

Merumbing. Pada tanggal 31 Desember 1948 Mohamad Roem dan Ali Sastroamidjojo ikut menyusul dipindahkan ke Bangka bergabung dengan Mohammad Hatta dan kawan-kawan.³⁵ Akibat penawanan ini maka untuk sementara perundingan antara RI dan Belanda tertunda. Namun demikian, walau sempat ditawan dan dibuang oleh Belanda, peran Mohamad Roem sebagai diplomat tidak berhenti di sini saja melainkan semakin melambungkan namanya dalam dunia politik Indonesia.

C. Peranan Mohamad Roem sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam Perundingan Roem-Royen (1949)

Perundingan Roem-Royen yang menghasilkan pernyataan Roem-Royen (7 Mei 1949) merupakan salah satu perundingan penting yang melambungkan nama Mohamad Roem sebagai seorang diplomat ulung Indonesia sekaligus mencatat namanya dalam tinta emas sejarah Indonesia. Pernyataan Roem-Royen sendiri juga tidak terlepas dari peristiwa yang melatar belakangnya, yakni agresi militer Belanda II yang dimulai pada tanggal 19 Desember 1948. Agresi militer yang dilakukan Belanda untuk kedua kalinya ternyata menimbulkan reaksi yang luar biasa dari dunia internasional, sehingga menuntut untuk segera dibukanya kembali perundingan antara Belanda dan Indonesia. Tuntutan dari berbagai pihak menuntut Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadakan sidang guna menyelesaikan konflik Indonesia Belanda yang sudah semakin meluas.

³⁵ Mohamad Roem, 1972, *Tiga Peristiwa Bersejarah*, Sinar Hudaya, Jakarta, hlm. 49

Dunia Internasional pada umumnya mengecam tindakan Belanda yang berani melanggar suatu persetujuan (gencatan senjata) yang disponsori PBB (KTN), apalagi penyerangan itu sendiri dilakukan di hadapan KTN. Akibat dari agresi militer tersebut, kekuatan dunia internasional mulai bergerak. Amerika Serikat yang semula bersikap netral kemudian mendesak agar diadakan perundingan yang sungguh-sungguh berdasarkan prinsip-prinsip Renville. Negara-negara Asia menyatakan protes dan serentak menutup lapangan terbangnya bagi pesawat-pesawat Belanda.³⁶

Perhatian dunia atas masalah Indonesia tercermin dari diselenggarakannya Konferensi Inter Asia di New Delhi pada 20-23 Januari 1949 atas prakarsa Pandit Jawaharlal Nehru. Konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil Afghanistan, Australia, Arab Saudi, Birma, Ethiopia, India, Irak, Mesir, Libanon, Pakistan, Philipina, Sri Langka, dan Yaman serta RRC, Nepal, Selandia Baru dan Muangthai memiliki acara tunggal yakni agresi Belanda di Indonesia.³⁷

Konferensi Inter-Asia menghasilkan sebuah resolusi yang segera dikirim oleh Nehru ke DK PBB.³⁸ Resolusi itu akhirnya dirumuskan pada 28 Januari 1949, di mana resolusi itu memuat pokok-pokok antara lain menyerukan kedua belah pihak yang bertikai agar melakukan gencatan senjata dan agar tawanan politik RI untuk segera dibebaskan dan mengembalikan pemerintah RI ke Yogyakarta. Diadakan perundingan antara kedua belah pihak di bawah pengawasan PBB di bawah UNCI (*United Nation Commission for Indonesia* atau

³⁶ Mohamad Roem, Bunga Rampai II, *op. cit.*, hlm. 32

³⁷ Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 46

³⁸ Meztika Zed, 1997, *PDRI Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 224

Komisi PBB untuk Indonesia). UNCI adalah pengganti KTN dengan sejumlah kewenangan yang lebih luas, di mana wewenangnya antara lain memprakarsai perundingan dengan wakil-wakil daerah di Indonesia guna membentuk pemerintahan sementara (*interim government*), menyelenggarakan pemilu untuk anggota Majelis Konstituante sebelum berdirinya RIS, dan memprakarsai bagi penyerahan kedaulatan RIS selambat-lambatnya 1 Juli 1949.

Resolusi DK-PBB tanggal 28 Januari 1949 ditolak oleh Belanda. Sebagai tindak lanjutnya akhirnya pihak UNCI memberikan ultimatum, yaitu berupa pemberian waktu kepada Belanda untuk menarik pasukannya sampai tanggal 15 Februari 1949 dan apabila ultimatum tersebut tidak dipenuhi maka akan dilaporkan kepada DK-PBB.

Karena mendapat ultimatum dari UNCI, Belanda dengan wakilnya Dr. Beel (wakil mahkota kerajaan Belanda untuk Indonesia) mengajukan usul baru. Gagasan ini kemudian dikenal dengan nama "Rencana Beel". Beel mengusulkan mempercepat pengesahan, mengadakan Konferensi Meja Bundar dan membicarakan Uni Indonesia-Belanda.³⁹

Tanggal 25 Maret 1949 pihak UNCI (KTN) di bawah pimpinan Merle Cochran mendorong kedua belah pihak agar secepatnya melakukan perundingan. Pada tanggal 2 April 1949 Mohamad Roem mengirimkan surat kepada UNCI yang menyatakan bahwa RI siap mengadakan perundingan dengan Belanda. Pada 12 April 1949, Dr. van Royen, wakil Belanda di PBB ditunjuk menjadi ketua delegasi Belanda ke pertemuan di Jakarta oleh pemerintah Belanda.

³⁹ Ajib Rosidi, *Sjarifuddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, Jakarta, Idayu Press, hlm. 110

Pertemuan delegasi RI dan Belanda dimulai di bawah naungan UNCI pada 14 April 1949 bertempat di hotel Des Indes, Jakarta. Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Mohamad Roem, sedangkan Ali Sastroamidjojo menjadi wakil ketua. Anggot-anggota delegasi RI terdiri dari 4 orang: Dr. J. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Dr. Supomo, dan Mr. Latuharhary, sedangkan penasehat-penasehatnya ialah: Sutan Sjahrir, Ir. Laoh Mohamad Natsir, Dr. Darma Setiawan, wakil kepala Kepolisian Soemarto, Mr. Dr. A. Kusumaatmadja, dan sekretaris umumnya Mr. A.K. Pringgodigdo. Sedangkan dari Belanda, delegasinya diketuai oleh Dr. van Royen, dan anggota-anggotanya terdiri dari Mr. Bloom, Mr. Jacob, Dr. van der Valde, Dr. Koets, Mr. van Hoogsraten, Dr. Geiben, Elink Schuurman dan Kolonel Thomson.

Perundingan yang baru berjalan satu minggu ini ternyata juga mengalami kemacetan seperti halnya perundingan-perundingan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya tafsiran dari van Royen bahwa pemerintah Belanda akan memulihkan pemerintah dan pemimpin-pemimpin RI hanya sesudah RI memerintahkan kesatuan-kesatuan bersenjata untuk menghentikan gerilya mereka, bekerjasama dalam memulihkan perdamaian dan memelihara ketertiban dan keamanan, serta bersedia menghadiri KMB.⁴⁰

Ternyata RI berpendapat sebaliknya, pihak RI tidak mungkin melakukan hal-hal di atas karena pemimpin-pemimpin RI terpencar-pencar, tiada kontak satu

⁴⁰ Iin Nur Insaniwati, *op. cit.*, hlm. 81

sama lain. Oleh karena itu, pihak RI menuntut pemulihan pemerintahan terlebih dahulu sebelum gencatan senjata diadakan.⁴¹

Ketika kedua belah pihak mengalami jalan buntu dalam perundingan, maka atas anjuran Merle Cochran, Mohammad Hatta agar datang ke Jakarta tanggal 24 April 1949. Kemudian pada keesokan harinya, pada tanggal 25 April 1949, keduanya sepakat bertukar pikiran mengenai pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta. Dan keduanya pun sepakat bahwa kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta dipandang sebagai langkah pertama menyelenggarakan Resolusi DK-PBB 28 Januari 1949.⁴²

Kesepakatan antara pihak RI dan Belanda akhirnya dapat tercapai pada 7 Mei 1949. Mohamad Roem dalam kesempatannya berbicara terlebih dahulu, antara lain dengan menyatakan dirinya adalah sebagai Ketua Delegasi RI yang telah diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka secara pribadi dan memberikan jaminan:

1. Mengeluarkan perintah kepada penganut-penganut republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya;
2. Kerjasama untuk memulihkan dan mempertahankan ketertiban dan keamanan;
3. Turut serta dalam KMB dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan rakyat kepada Negara Indonesia Serikat yang penuh dan tanpa syarat.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 81

⁴² Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 548

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta berusaha mendesak supaya politik demikian diterima oleh pemerintah RI selekas-lekasnya setelah dipulihkan di Yogyakarta.

Pernyataan Ketua Delegasi RI itu disambut oleh van Royen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berhubungan dengan keterangan yang diucapkan ketua delegasi Republik. Maka pemerintah Nederland menyetujui mengembalikan pemerintah RI ke Yogyakarta dan membentuk panitia-panitia bersama, di bawah pimpinan panitia PBB untuk Indonesia, yang akan membuat aturan-aturan sementara untuk menghentikan gerilya dan pemeliharaan hukum dan ketertiban.
- b. Pemerintah Republik harus bebas dan mempunyai kesempatan penuh untuk menjalankan fungsinya di Karesidenan Yogyakarta.
- c. Pihak Belanda akan segera mengakhiri operasi militernya dan membebaskan semua tahanan politik sejak 17 Desember 1948.
- d. Pemerintah Nederland akan menghentikan pembentukan atau pengakuan daerah di wilayah yang dikuasai oleh Republik sebelum tanggal 17 Desember 1948.
- e. Pemerintah Nederland menyetujui adanya Republik sebagai negara bagian dalam Negara Indonesia Serikat, dengan suara sepertiga dari jumlah suara dalam badan perwakilan federal.
- f. KMB yang diadakan segera sesudah pemerintah republik dikembalikan ke Yogyakarta, akan membicarakan bagaimana mempercepat penyerahan kedaulatan kepada RIS yang benar-benar penuh tanpa syarat sesuai dengan prinsip Renville.
- g. Pemerintahan Nederland menyetujui bahwa daerah-daerah di luar Yogyakarta dimana pemerintah sipil dan polisi republik masih menjalankan tugasnya, akan tetap berfungsi”.⁴³

Pernyataan-pernyataan di atas tersebut inilah yang nantinya dikenal dengan pernyataan “*Roem-Royen Statement*”. Pernyataan Roem-Royen itu ternyata menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan baik di Indonesia maupun Belanda. Di Indonesia, reaksi yang ditimbulkan atas pernyataan Roem-Royen berasal dari tubuh Masyumi. Terjadi perbedaan pendapat, pro dan kontra terhadap pernyataan Roem Royen, yakni dari Mohamad Roem dan Mohamad Natsir.

⁴³ Mohamad Roem, *Bunga Rampai II*, *op. cit.*, hlm. 47-48

Menurut Mohamad Roem bahwa persetujuan tersebut yang dibuatnya membuka pintu yang lebar bagi Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingannya. Ia menyarankan kepada rekan-rekannya untuk tidak melihat suatu persetujuan sebagai final. Perjuangan belum berakhir, sebab menurut Mohamad Roem perjuangan tidak akan ada yang selesai. Tetapi ia yakin bahwa kembalinya pemerintah ke Yogyakarta akan menuju kepada pengakuan dari segenap dunia terhadap eksistensi RI. Menurut Mohamad Roem, dengan pengakuan ini, RI dapat melanjutkan perjuangannya lagi. Juga secara internasional kedudukan RI bertambah kuat dibanding sebelumnya, dan kedudukan yang bertambah kuat inilah yang perlu dimanfaatkan selanjutnya dalam perundingan dengan pihak Belanda.⁴⁴

Sedangkan Mohamad Natsir berpendapat bahwa Mohamad Roem sebagai ketua delegasi RI hanya mendapat mandat dari Soekarno dan Hatta yang tidak mempunyai wewenang lagi karena pada waktu itu mereka bukan lagi sebagai presiden dan wakil presiden, karena saat itu keduanya sedang dalam tahanan Belanda. Dan menurutnya, hasil Roem-Royen hendaknya dirundingkan terlebih dahulu kepada Sjafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI. Di samping itu perundingan ini terlalu dini untuk diselesaikan. Dalam hal ini Natsir lebih suka melihat bila perkembangan-perkembangan pembicaraan disampaikan terlebih dahulu kepada PBB sehingga dengan demikian delegasi dapat mengulur waktu untuk memperkuat kedudukan, mengingat gerilyawan bertambah kuat di

⁴⁴ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm 194.

daerah-daerah.⁴⁵ Meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam tubuh Masyumi, partai ini akhirnya memberikan persetujuannya terhadap Pernyataan Roem-Royen pada 28 Mei 1949.⁴⁶

Reaksi berikutnya mengenai Pernyataan Roem-Royen datang dari Panglima Besar Jendral Soedirman maupun dari pimpinan PDRI Sjafruddin Prawiranegara. Sjafruddin Prawiranegara mengadakan musyawarah besar PDRI sebagai bentuk reaksi terhadap perundingan Roem-Royen yang berlangsung pada tanggal 14-17 Mei 1949 di Sumpur Kudus. Dalam rapat tersebut Sjafruddin Prawiranegara menyesali langkah-langkah diplomatik yang ditempuh oleh Soekarno-Hatta. Para pemimpin PDRI menyatakan penyesalannya dan menentang perundingan tersebut sebagai konsekuensi atas sikap PDRI, Sjafruddin Prawiranegara dalam pertemuan tersebut mendesak keras untuk secepatnya mengembalikan mandat yang dipegangnya kepada Soekarno-Hatta.⁴⁷

Sementara itu Panglima Besar Jenderal Soedirman sejak semula kurang setuju bila diadakan perundingan kembali antara RI dan Belanda, sebab pada saat itu angkatan bersenjata dan laskar-laskar rakyat berada pada posisi yang menguntungkan untuk memukul mundur pasukan Belanda.⁴⁸ Selain itu, Soedirman juga menyatakan kekhawatirannya apabila nasib perundingan-perundingan sebelumnya yang hasilnya menempatkan pihak RI pada posisi yang selalu dirugikan oleh pihak Belanda. Ketika perundingan telah berakhir dan dihasilkan suatu pernyataan Roem-Royen, Soedirman kembali bereaksi. Kali ini

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 192

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 196

⁴⁷ Meztika Zed, *op.cit.*, hlm. 274

⁴⁸ A.H Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid IX*, Disjarah AD dan Angkasa, Bandung, hlm. 540

Soedirman merasa tersinggung berkaitan dengan pasal 1 pernyataan Ketua Delegasi RI Mohamad Roem yang menyebutkan kata-kata “penganut-penganut politik RI yang bersenjata” dalam pernyataan Roem-Royen tersebut.

Menurut Panglima Besar Jenderal Soedirman, kata-kata tersebut secara terang-terangan telah menyepelkan TNI, dan secara formal penggunaan kata-kata itu seakan-akan tidak mengakui lagi keberadaan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Oleh karena itulah, Soedirman mengusulkan kepada Pemerintah Darurat di Sumatera agar memberi perintah kepada Mohamad Roem untuk mengubah kata-kata “penganut-penganut politik bersenjata” dengan “APRI” atau “Tentara”.⁴⁹ Untuk itu maka Soedirman meminta Mohamad Roem untuk segera menghubunginya. Mengenai hal itu, walaupun Mohamad Roem sendiri tidak pernah menerima perintah itu dari Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera sebagaimana disinggung dalam radiogram tanggal 22 Juni 1949, tetapi Mohamad Roem mengakui kekeliruannya dengan menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menyepelkan tentara.⁵⁰

Sedangkan kelompok yang paling merasa dikecewakan akibat perundingan tersebut adalah kelompok PDRI di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara sangat menyesalkan oleh adanya perundingan tersebut karena dalam perundingan sebelumnya Indonesia selalu dirugikan. Sjafruddin Prawiranegara merasa dilangkahi. Menurutnya, jika pihak Republik terpaksa menempuh jalan perundingan, maka sebaiknya perundingan dilakukan oleh pemimpin PDRI, sebab merekalah yang mengetahui kekuatan republik.

⁴⁹ Ali Sastroamidjojo, 1974, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, Kinta, Jakarta, hlm. 280

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 267

Kekecewaan PDRI berbuah hasil dan segera ditanggapi oleh pemimpin RI di Bangka pada 5 Juni 1949, Hatta bersama rombongannya berangkat ke Aceh untuk menemui Sjafruddin Prawiranegara guna menunjukkan bahwa para pemimpin di Bangka sama sekali tidak mengabaikan PDRI.

Akhirnya pada tanggal 14 Juni 1949 PDRI Sjafruddin Prawiranegara bersedia menerima Pernyataan Roem-Royen dengan syarat :

- a. Angkatan bersenjata republik harus berada dalam posisi yang saat itu didudukinya.
- b. Angkatan bersenjata Belanda berangsur-angsur ditarik dari posisi yang saat itu didudukinya.
- c. Pengembalian pemerintah republik ke Yogyakarta dilakukan tanpa syarat
- d. Kedaulatan republik atas Jawa, Madura, dan Sumatera dan pulau-pulau sekitar (dekat dengan pantai) harus diakui oleh hegemoni Belanda sejalan dengan Persetujuan Linggajati.⁵¹

Meskipun pada akhirnya PDRI bersedia menerima Pernyataan Roem-Royen, tetapi Mohammad Hatta masih berupaya untuk menemui Sjafruddin Prawiranegara kembali. Ia kemudian mengirimkan suatu delegasi yang terdiri dari Mohamad Natsir, Dr. Halim, dan Dr. J. Leimena menemui Sjafruddin Prawiranegara. Pada tanggal 2-3 Juli 1949 mereka tiba di Padang, sedangkan pada 6-7 Juli 1949 diadakan perundingan antara utsan Mohammad Hatta dan PDRI yang berlangsung di Koto Kociak, Padang Panjang Payakumbuh. Setelah melalui perundingan yang alot akhirnya Sjafruddin Prawiranegara dengan pertimbangan demi menjaga persatuan dan kesatuan RI bersedia kembali ke Yogyakarta, asalkan tuntutananya dipenuhi oleh pemerintah pusat.

Sebagai bentuk konkret dari perjanjian Roem-Royen pada tanggal 24 Juni 1949 tentara Belanda mulai meninggalkan Yogyakarta dan seluruh tanggung

⁵¹ Kahin, *op. cit.*, hlm. 541

jawab pemerintah dan keamanan di Yogyakarta dipegang oleh HB IX. Hal itu diikuti dengan dibebaskannya Soekarno dan Hatta bersama menteri yang ditawan di Bangka pada tanggal 6 Juli 1949.

Meski banyak terjadi pro dan kontra yang mewarnai dikeluarkannya pernyataan 7 Mei 1949 terlepas dari itu semua, bangsa Indonesia tidak dapat menyangkal bahwa perundingan tersebut membawa hikmah bagi pencapaian kedaulatan Indonesia.

Hasil yang telah dicapai melalui perundingan ini diakui telah membawa jalan bagi perundingan berikutnya yaitu KMB, di mana pada kesempatan itulah pada akhirnya Indonesia memperoleh kedaulatannya.

Berdasarkan uraian di atas, yakni dari latar belakang terjadinya perundingan Roem-Royen sampai realisasi pernyataan Mohamad Roem, terlihat bahwa Mohamad Roem dengan dukungan dari berbagai pihak telah mencapai puncak perjuangannya dalam bidang diplomatik. Dari keruntuhan negara yang begitu rupa, dan pemimpin-pemimpin RI terpencar-pencar, serta hampir seluruh wilayah RI diduduki oleh Belanda, Mohamad Roem dapat menciptakan kemenangan. Pertama, kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Kedua, diadakannya KMB yang pada akhirnya menghasilkan pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda.⁵² Peranan konkret Mohamad Roem dalam perundingan ini ditunjukkan dari kesediaannya sebagai ketua delegasi RI untuk melangsungkan pertemuan dengan Belanda melalui surat yang ia kirim kepada UNCI. Dalam surat itu, Mohamad Roem memberitahukan bahwa kembalinya pemerintah RI ke

⁵² Iin Nur Insaniwati, *op. cit*, hlm. 91

Yogyakarta akan merupakan syarat pertama bagi berhasilnya perundingan-perundingan. Di dalam hubungan ini, ia hanya membicarakan seluk-beluk yang praktis mengenai pemulihan kekuasaan pemerintah RI di Yogyakarta, dan oleh karena itu ia mengharap pemerintah Belanda akan setuju mewujudkan pemulihan kekuasaan ini sehingga setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta selanjutnya dapat mengambil keputusan-keputusan yang mendasar.⁵³

Hasil dari karya diplomat tersebut merupakan suatu pernyataan van Royen dan Mohamad Roem yang merupakan dokumen bersejarah yang penting bagi kelanjutan tegaknya RI. Dengan demikian, dokumen Roem-Royen menempati kedudukan khas yang dikenal oleh seluruh dunia.⁵⁴ Menanggapi keberhasilan tersebut Mohamad Roem berpendapat :

“ Bukan karena kepintaran saya, tetapi adalah rahmat Allah semata-mata. Tuhan mengetahui keinginan rakyat dan bangsa Indonesia sebenar-benarnya hendak merdeka, sehingga tidak peduli habis harta benda dan jiwa. Karena itu, pertolongan-Nya datang, Tuhanlah yang membantu perjuangan kita, karena kita jalankan dengan jujur dan ikhlas.”⁵⁵

Demikianlah, pandangan dan pendapat Mohamad Roem tentang dasar perjuangannya yang pada akhirnya telah membawa kemenangan bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta.

⁵³ Anak Agung Gde Agung, 1979, *Renville*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 1979

⁵⁴ Soemarso Soemarsono, *op. cit.*, hlm. 154

⁵⁵ S.T Rais Alamsyah, *op. cit.*, hlm. 61

D. Peranan Mohamad Roem sebagai Wakil Ketua Delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB)

Pernyataan Roem-Royen 7 Mei 1949 telah membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan kedudukan yang semakin kuat. Konferensi ini dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Januari 1949. Untuk persiapannya maka pada 24 Juli 1949 dibentuk delegasi RI ke KMB.

Delegasi RI yang terbentuk terdiri dari ketua yang dipegang oleh Mohammad Hatta dan wakilnya dipegang oleh Mohamad Roem. Sedangkan para anggotanya adalah Dr. Soekiman Wirdjosandjojo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Sujono Hadinoto, Kolonel T.B Simatupang, Ir. Djuanda, Prof. Dr. Supomo, dan R. Margono Djojohadikusumo (yang kemudian digantikan oleh putranya Dr. Soemitro Djojohadikusumo). Anggota delegasi diberi kedudukan menteri negara. Sebagai delegasi diangkat kurang lebih 10 orang ahli di berbagai bidang antara lain: Mr. Mohamad Yamin, Dr. Darmasetiawan, Prof. Mr. Sunario Kolopaking, Mr. Dr. A. Kusumaatmadja, R. Sawaka, R. Surasno, dan R. Soediono.⁵⁶

KMB yang diselenggarakan antara 23 Agustus-2 November 1949 dibuka dengan resmi oleh Perdana Menteri Belanda Dr. William Dress. Belanda mengirimkan wakilnya yang ditunjuk sebagai ketua delegasi, yakni Mr. van Maarseveen, dari UNCI diketuai oleh Merle Cochran dari AS, sedangkan delegasi BFO diketuai oleh Sultan Hamid II.

⁵⁶ Ali Sastroamidjojo, *op. cit.*, hlm. 288

Selama lebih dari 2 bulan sejak KMB berlangsung sempat diwarnai dengan kesulitan-kesulitan untuk mencapai kata sepakat antara Indonesia dan Belanda sehingga tidak jarang menimbulkan kemacetan dalam persidangan.⁵⁷

Kemacetan-kemacetan yang timbul itu berkaitan dengan perumusan bentuk dan isi Uni Indonesia-Belanda. Belanda menuntut agar Uni dikepalai oleh raja negeri Belanda yang dalam pelaksanaannya kepala Uni tidak hanya sebagai lambang belaka seperti halnya yang terjadi pada persemaikmuran bersama Inggris, melainkan sebagai “Kepala Negara Uni” dengan wewenang yang mengingatkan kepada seorang kepala negara konstitusional. Menurut usul Belanda, kepala Uni harus dinamakan “Mahkota Uni” yang dipegang oleh Ratu Juliana secara turun-temurun.⁵⁸

Untuk mengatasi kemacetan-kemacetan tersebut, pada 17 September 1949 dibentuklah sebuah panitia kecil yang terdiri dari van Royen, Mohamad Roem, dan Anak Agung Gde Agung. Dalam pembicaraan yang dilakukan oleh panitia ini dihasilkan suatu kesepakatan untuk membentuk suatu Uni yang dikepalai raja Belanda untuk mengurus kepentingan bersama.

Selanjutnya, KMB berhasil mengatur masalah kerjasama militer dan hak milik orang asing dan hak istimewa dalam bidang ekonomi bagi bangsa Belanda di Indonesia. Persoalan yang paling rumit dan berat dalam KMB adalah persoalan yang berkaitan dengan utang-piutang dan Irian Barat (Irian Jaya).

Namun agaknya mengenai masalah Irian Barat, Belanda bertahan tidak akan melepaskan Irian Barat karena telah terikat dengan Parlemen untuk tidak

⁵⁷ Iin Nur Insaniwati, *op. cit.*, hlm. 93

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 93

melepaskan Irian Barat. Maka kemudian ketua delegasi Mohammad Hatta memutuskan untuk menanggukuhkan persoalan Irian Barat. Dalam hal ini Mohamad Roem mendukung pendirian Mohammad Hatta mengenai penanggukuhan masalah Irian Barat.

Pada 2 November 1949 KMB diakhiri dengan penandatanganan suatu perjanjian yang kemudian terkenal dengan nama Perjanjian KMB yang terdiri dari dua pokok bagian, yakni induk dan anak persetujuan. Ketentuan yang paling penting dari Persetujuan KMB adalah Piagam Penyerahan Kedaulatan yang lengkap dan tanpa syarat selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949 oleh Belanda kepada RIS, kecuali Irian Barat dan RIS terdiri dari RI dan 15 negara bagian (daerah) ciptaan Belanda.⁵⁹

Setelah KMB berakhir bukan berarti semua persoalan ikut berakhir pula. Ada dua hal yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah, yakni meyakinkan KNIP bahwa hasil-hasil KMB adalah hasil maksimum yang dapat dicapai waktu itu dan mengadakan persiapan mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda. Menenai hal tersebut di atas, dua orang anggota delegasi Indonesia, yaitu Mohamad Roem dan T.B Simatupang kembali ke tanah air pada 14 November 1949.

Dengan diadakannya KMB, maka kabinet baru pun dibentuk. Kabinet baru yang ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke RIS sesuai hasil KMB adalah Kabinet Hatta. Di kabinet ini Mohamad Roem ditunjuk sebagai menteri negara tanpa portofolio. Berkenaan

⁵⁹ Mohammad Hatta, *op. cit*, hlm. 556

dengan hal penyerahan kedaulatan tersebut, pemerintah RI membentuk suatu panitia khusus. Dan sebagai ketua Panitia Persiapan Nasional ditunjuklah Mohamad Roem. I ditugaskan untuk menyelenggarakan penyerahan kedaulatan di Indonesia, termasuk serah terima departemen-departemen. Tugas tersebut seluruhnya selesai dalam waktu kurang dari dua bulan. Inilah peranan konkret Mohamad Roem dalam KMB. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan upacara penyerahan kedaulatan di Istana *Op den Dam* Amsterdam-Belanda dan Istana Merdeka-Jakarta. Upacara penyerahan kedaulatan kerajaan Belanda kepada RIS di Amsterdam dihadiri oleh Ratu Juliana yang berwenang menandatangani Piagam Penyerahan Kedaulatan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta yang disertai beberapa menteri di antaranya, Sultan Hamid II. Sedangkan penyerahan kedaulatan di Jakarta dilakukan oleh wakil kota Belanda di Indonesia yaitu HVK (*Hoge Vertegen Wordigen van de Kroon*) Lovink kepada wakil RIS yaitu Sri Sultan HB IX didampingi Mohamad Roem. Sebagai seorang pejuang diplomasi Mohamad Roem juga memiliki peranan yang besar bagi bangsa Indonesia yang mampu membawa namanya sebagai pejuang diplomasi Indonesia.

BAB IV

**HASIL YANG DIPEROLEH MOHAMAD ROEM KETIKA MENJADI
SEORANG DIPLOMAT TERNAMA**

Mohamad Roem adalah seorang tokoh yang tidak bisa diabaikan jasanya dalam keberhasilan perundingan-perundingan tersebut. Sejarah bangsa Indonesia mencatatnya sebagai pejuang diplomasi yang ulung. Bagi Mohamad Roem, meja perundingan adalah senjata yang ampuh untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dunia diplomasi bagi Mohamad Roem adalah suatu dunia yang tidak asing lagi. Sebelum Indonesia merdeka, ia telah mulai menekuni bidang ini bersama Haji Agus Salim yang juga seorang politikus dan diplomat ulung, oleh Mohamad Roem dijadikan sebagai “guru” yang membimbingnya baik di bidang agama, politik, maupun diplomasi yang pada akhirnya membawa Mohamad Roem sebagai salah satu diplomat besar di Asia.

**A. Pernyataan Roem-Royen sebagai Suatu Puncak Karya dari Sang
Diplomat**

Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, perjuangan diplomasi mempunyai peran yang sangat besar. Kemerdekaan dan kedaulatan penuh yang berhasil diraih tidak hanya dicapai melalui pertempuran fisik belaka melainkan juga dicapai dengan jalur perundingan atau diplomasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan diplomasi memberikan andil yang sangat besar bagi tegaknya

negara Indonesia, sekaligus memperoleh kedaulatan penuh dari Belanda. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa diplomasi adalah ujung tombak perjuangan RI.

Perjuangan diplomasi ini merupakan jalan panjang yang mendebarkan sebab setiap tahap perundingan melahirkan kekeruhan, walau hasil yang dicapai dapat dijadikan dasar terpihak dalam perundingan selanjutnya. Perundingan pun merupakan jalan bertahap menuju kemerdekaan.

Dan sebagai salah satu langkah yang diambil dalam perundingan demi memperoleh kedaulatan Republik Indonesia adalah dilaksanakannya perundingan antara Indonesia dan Belanda yang salah satunya adalah perundingan Roem-Royen yang menghasilkan suatu pernyataan yang dikenal dengan sebutan Pernyataan Roem-Royen (*Roem-Royen Statements*). Perundingan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes merupakan salah satu perundingan penting yang melambungkan nama Mohamad Roem sebagai seorang diplomat ulung Indonesia sekaligus mencatatkan namanya dalam tinta emas sejarah Indonesia. Namun usahanya ini tidak semata-mata atas hasil kerja kerasnya sendiri melainkan didukung oleh berbagai pihak seperti Soekarno-Hatta, Sutan Sjahrir, maupun tokoh-tokoh besar lainnya.

Perundingan bersejarah itu terjadi pada tanggal 7 Mei 1949 pukul 17.00 WIB, pada waktu perundingan Roem-Royen, setelah secara informil dalam pembicaraan di bawah empat mata antara Mohamad Roem dan van Royen tercapai persetujuan. Dalam acara resmi itu Mohamad Roem berpidato terlebih dahulu, antara lain menyatakan bahwa dirinya sebagai ketua Delegasi Republik Indonesia diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad

Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka pribadi, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dan Pedoman Pelaksanaan tanggal 23 Maret 1949. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta akan berusaha mendesak supaya politik demikian diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia secepat-lekasnya setelah dipulihkan di Yogyakarta.¹

Dalam perundingan itu, Mohamad Roem berpidato terlebih dahulu di mana dalam pidatonya menyatakan bahwa dirinya sebagai ketua Delegasi RI diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka pribadi. Setelah Mohamad Roem selesai berpidato disusul kemudian oleh van Royen yang menyatakan persetujuan pemerintah Belanda untuk memulihkan pemerintah RI di Yogyakarta, dan bahwa Belanda menghentikan dengan segera segala kegiatan militernya serta membebaskan kembali semua tahanan politik yang ditahan sejak tanggal 17 Desember 1948. Selain itu dinyatakan juga bahwa Belanda membatasi pendirian “Negara” di daerah Republik sampai keadaan pada sebelum tanggal 19 Desember 1948, dan tidak memperluasnya dengan yang baru di daerah-daerah tersebut. Selanjutnya Belanda akan berusaha dengan keras melaksanakan KMB untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang nyata dan sempurna kepada Negara Indonesia Serikat sesuai dengan asas-asas persetujuan Renville.

Mohamad Roem adalah seseorang yang mempunyai bakat besar untuk menjadi seorang pejuang sekaligus perunding. Sebagai seorang pribadi ia adalah seorang yang cerdas, ulet, dan sabar. Kepribadiannya itulah yang kemudian

¹ Soemarso Soemarsono, 1978, *Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 154-155

menjadi salah satu bekalnya untuk berjuang. Bahkan karena kesabarannya itulah yang sering membuat lawan rundingnya mudah naik darah. Dalam menghadapi lawan di meja perundingan ia memang cenderung diam dan sangat hati-hati. Ketika para diplomat Belanda sedang mengemukakan pendapatnya ia justru diam tanpa memberikan reaksi apaun baik sanggahan, kritikan maupun tanggapan. Hal itu justru dimanfaatkannya untuk berpikir mencari akal guna mematahkan pendapat Belanda dan berusaha segala usul, pendapat dari pihak RI bisa diterima oleh Belanda. Ia menunggu diplomat Belanda mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu baru kemudian ia akan berkomentar. Sebagai salah satu anggota delegasi, ia dinilai sebagai seorang kritikus yang tidak disukai oleh Belanda karena kritiknya yang keras, tajam dan cenderung santai dalam menghadapi Belanda.

Sebagai seorang pribadi, ia mempunyai semangat juang yang tinggi dalam berjuang. Di samping sifat sebagai pejuang tersebut, juga menonjol kemampuannya untuk tampil sebagai pemimpin yang mencita-citakan persatuan bangsanya dan menuntunnya melalui jalan bermusyawarah tanpa mengorbankan prinsip pendiriannya. Maka selain sebagai seorang pejuang, Mohamad Roem juga tampil sebagai seorang perunding (diplomat) yang memperoleh kesempatan emas dalam sejarah kehidupannya untuk mengembangkan kemampuannya tersebut dengan sebaik-baiknya.

Ketika perundingan yang kemudian terkenal dengan *Roem-Royen Statements* berlangsung pada tanggal 14 April 1949, Roem mengecam serangan-serangan Belanda. Dalam pidatonya Roem menyatakan agresi Belanda yang

kedua telah mengakibatkan hilangnya sisa kepercayaan rakyat Indonesia bagi berhasilnya suatu perundingan damai.²

Sesungguhnya, perundingan yang berlangsung di Hotel Des Indes di jalan Molenvliet, merupakan suatu perundingan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa Indonesia yang berdaulat sebab pertempuran lokal hanya mampu meletup-letup di daerah pinggiran, sementara pusat telah dikuasai oleh Belanda. *Roem-Royen Statements* melahirkan suatu keadaan yang jika dilihat dari perspektif perjuangan militer sangat sukar dicapai dalam waktu singkat. Dalam hal ini, *Royen statements* menyatakan: pertama, pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melaksanakan jabatan yang sepatutnya dalam suatu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta; kedua, pemerintah Belanda menguatkan sekali lagi kesanggupan untuk menjamin penghentian segera gerakan-gerakan militer dan membebaskan segera tanpa syarat tahanan politik yang ditangkap sejak tanggal 17 Desember 1948 dalam Republik Indonesia segera setelah persetujuan ini, proses pencapaian kedaulatan RI berjalan lebih lancar. Pada tanggal 10 Juni 1948 ditetapkan pertemuan antara Indonesia dan Belanda, yang diikuti negara federal dan KTN. Pada tanggal 22 Juni 1949 Royen mengumumkan penarikan pasukan Belanda. Setelah itu, praktis fungsi Sultan HB IX sebagai menteri pertahanan dalam Kabinet Hatta diaktifkan kembali. Selanjutnya, giliran Soekarno-Hatta dielukan rakyat Yogyakarta, sekembalinya dari tahanan mereka di Bangka tanggal 5 Juli 1949 sebagai hasil

²Fachry Ali, Mohamad Roem: Diplomat Pejuang, dalam Yanto Bashri dan Retno Shuffatni (ed), 2005, *Sejarah Tokoh Bangsa*, Pustaka Tokoh Bangsa, Yogyakarta, hlm. 242

karya Roem. Dalam hal ini, dengan pulihnya pemerintah RI pada tanggal 13 Juli 1949, Sjafruddin Prawiranegara secara resmi menyerahkan kembali kekuasaannya sebagai presiden PDRI kepada Presiden Soekarno dalam sidang kabinet pertama, setelah pulihnya keamanan.³

Perundingan Mohamad Roem-van Royen ternyata merupakan karya puncak Mohamad Roem dalam diplomasi.⁴ Faktor yang amat kuat mempengaruhi Roem sebagai diplomat dan perunding bukanlah semata-mata bakat atau warisan ketrampilan yang diperoleh dari Haji Agus Salim, melainkan bentukan pribadi yang bebas. Dengan bentukan itu, ia terbebas dari rasa risih untuk bertindak sebagai kelompok-kelompok kekuatan perlawanan terhadap Belanda lebih menekankan perjuangan fisik daripada perundingan.⁵

Makna bentukan pribadi yang bebas dari Mohamad Roem di sini maksudnya adalah penekanan untuk lebih memilih lapangan diplomasi dalam tarik-menarik kekuatan pro dan kontra perundingan-akan bisa dipahami dengan melihat realitas kekuatan pergerakan sosial dan persenjataan Indonesia pada waktu itu. Dengan melihat situasi semacam ini, sedikitnya Roem bisa ditempatkan pada perjuangan kemerdekaan penuh yang mendapat pengakuan formal dari dunia internasional, khususnya Belanda. Dengan itu pula, sekaligus menempatkan perjuangan diplomasi pada lokasi-lokasi tersendiri dalam perjuangan kemerdekaan.

Perundingan Roem-Royen ini tidak akan dapat terlaksana begitu saja tanpa bantuan dari bantuan AS dan juga karena ketegasan sikap AS terhadap Belanda

³ *Ibid.*, hlm. 243

⁴ Soemarso Soemarsono, *op. cit.*, hlm. 154

⁵ Yanto Bashri dan Retno Shuffatni (ed.), *op. cit.*, hlm. 231

yang menginginkan untuk segera dibuka kembali perundingan antara RI dan Belanda. Maka kemudian pada tanggal 14 April perundingan dapat dibuka kembali antara RI dan Belanda, dengan RI diwakili oleh Mohamad Roem sedang Belanda diwakili oleh van Royen. Namun seminggu kemudian perundingan terhenti lagi karena van Royen menafsirkan bahwa pemerintah Nederland akan memulihkan pemerintah dan pemimpin-pemimpin RI hanya sesudah pemerintah RI memerintahkan kesatuan-kesatuan bersenjata untuk menghentikan gerilya mereka dan bekerja sama dalam memulihkan perdamaian dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan, dan bersedia menghadiri KMB. Akan tetapi RI berpendapat sebaliknya, pihak RI tidak mungkin melakukan hal-hal di atas karena pemimpin-pemimpin RI terpecah-pecah, tidak ada kontak satu dengan yang lain. Kemacetan ini terus berlangsung hingga tanggal 1 Mei, sampai akhirnya pihak RI menerima ketentuan-ketentuan persetujuan itu pun juga dikarenakan atas desakan keras dari wakil AS dalam UNCI, Cochran. Adapun ketentuan persetujuan Roem-Royen itu adalah⁶:

- 1). Pengeluaran perintah oleh pihak RI kepada kesatuan-kesatuan bersenjata RI untuk menghentikan perang gerilya, sedangkan pemerintah dan pemimpin-pemimpin RI dipulihkan kembali ke Yogyakarta;
- 2). Kerjasama dalam pemulihan perdamaian, dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan
- 3). Belanda akan menyokong RI untuk menjadi negara bagian dari RIS dengan mempunyai sepertiga suara dalam Perwakilan Federal;
- 4). Ikut serta dalam KMB di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan tanpa syarat, nyata dan lengkap.

Namun akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapailah persetujuan antara RI dan Belanda, dan persetujuan inipun dikenal dengan sebutan *van Royen-Roem*

⁶ Drs. G. Moedjanto, 1988, *Indonesia Abad ke-20 Jilid II*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 53

Statements (Pernyataan Roem-Royen). Sesungguhnya sebelum tercapai kesepakatan antara Belanda dan Indonesia dalam perundingan Roem-Royen tersebut, terdapat banyak sekali perbedaan pendapat pro dan kontra antara pihak-pihak yang mendukung RI maupun dari pihak Belanda sendiri yang tidak menginginkan dibukanya perundingan kembali. Hingga akhirnya DK-PBB mengeluarkan Resolusi pada tanggal 23 Maret 1949 ini yang menentukan bahwa pemerintahan Republik Indonesia harus dikembalikan dulu di Yogyakarta dan sesudah dikeluarkan perintah berhenti tembak-menembak, maka RI agar ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag untuk menerima penyerahan atau pengakuan kemerdekaan yang diperpendek waktunya tanpa masa peralihan.⁷

Apa yang dicapai melalui resolusi tersebut atau yang disebut “*the Canadian ruling*” ini adalah bahwa Rencana Beel yang dimaksud untuk mengucilkan Republik, dengan meniadakan masa transisi, menjadi pelaksanaan penyerahan kedaulatan Indonesia kepada RI tanpa masa transisi. Masa transisi selama perundingan sulit dicapai. Sesungguhnya, inilah intisari dari sesuatu yang kita kenal sebagai pernyataan van Roijen-Roem (*van Roijen-Roem Statements*). Adapun pernyataan ini bukan persetujuan yang bentuknya satu, melainkan terdiri dari dua keterangan yang berbeda, masing-masing diucapkan oleh ketua delegasi. *van Roijen-Roem Statements* yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949, telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 1949 dengan merealisasikan kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta pada hari tersebut.⁸

⁷ Mohamad Roem, 1989, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 11

⁸ *Ibid.*, hlm. 14

Dalam perundingan Roem-Royen, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam rangka berunding diatasi dengan mengadakan “*meeting of minds*” (persesuaian pendapat), dengan jaminan pribadi Soekarno-Hatta. Setelah melewati perundingan-perundingan informal yang sulit selama 1 bulan, maka pada pertemuan pleno tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, kedua delegasi masing-masing membuat pernyataan. Dalam pernyataan Van Royen tidak ada perkataan, bahwa pasukan Belanda akan ditarik mundur. Hal itu termasuk dalam pernyataan van Royen yang mengatakan bahwa sebagai syarat agar pemerintah Republik yang dikembalikan di Yogyakarta dapat berfungsi dengan wajar. Sebelum pemerintah RI dikembalikan pada tanggal 6 Juli 1949, maka lebih dulu pasukan Belanda ditarik mundur. Ini merupakan suatu pukulan hebat bagi pasukan Belanda yang merasa menang, tapi tanpa pertempuran diperintah untuk mundur dari Yogyakarta. Untuk pertama kali dalam perundingan selama 4 tahun dengan Belanda, yang dikatakan, malah hanya sebagai pengertian dijalankan.

Sesudah pemerintah RI kembali di Yogyakarta, maka pemimpin-pemimpin RI dapat bersatu dan berkumpul lagi. Mereka sebelumnya tersebar di pengasingan, di penjara, di daerah pendudukan dan di hutan-hutan untuk menjalankan perang gerilya. Dalam suasana baru itu, maka yang kurang dapat ditambah, dengan mungkinnya bekerja sama yang teratur.

van Royen-Roem Statements di kedua pihak menimbulkan tantangan yang hebat. Yang paling mementang ialah wakil mahkota Netherland di Indonesia

sendiri, yaitu Dr. Beel. Sangat jelas baginya bahwa yang dijalankan itu Resolusi PBB, bukan rencana Beel, maka ia mengundurkan diri.⁹

Meskipun telah melalui berbagai macam pro dan kontra tetapi akhirnya perundingan Roem-Royen telah menghasilkan sesuatu yaitu Pernyataan Roem-Royen yang telah membuka jalan bagi bangsa Indonesia menuju kedaulatan. Dari latar belakang terjadinya perundingan Roem-Royen sampai realisasi pernyataan Mohamad Roem, terlihat bahwa Mohamad Roem dengan dukungan dari berbagai pihak telah mencapai puncak perjuangannya dalam bidang diplomatik. Dari situasi negara yang hampir terpuruk, di mana pemimpin-pemimpin banyak yang ditawan dan saling terpisah antara satu dan yang lain, serta hampir seluruh wilayah RI diduduki oleh Belanda, Mohamad Roem dapat menciptakan kemenangan. Pertama, kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Kedua, diadakannya KMB yang pada akhirnya menghasilkan pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Hasil karya diplomat tersebut yakni suatu pernyataan Roem-Royen yang merupakan dokumen bersejarah yang penting bagi kelanjutan tegaknya RI. Dengan demikian dokumen Roem-Royen menempati kedudukan yang khas yang dikenal oleh seluruh dunia. Ini pula telah menempatkan Mohamad Roem dalam deretan nama-nama diplomat dunia dengan hasil karya yang senafas dengan nama pribadi.¹⁰

⁹ Mohamad Roem, 1977, *Bunga Rampai Dari Sejarah Jilid II*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 50

¹⁰ Soemarso Soemarsono, *op. cit.*, hlm. 154

B. Perjuangan Mohamad Roem dalam Bidang Pemerintahan Pasca KMB.

Perjuangan Mohamad Roem bagi bangsa Indonesia belum berakhir sampai di sini saja seiring dengan berakhirnya KMB waktu itu. Setelah KMB berakhir, ada dua hal yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah, yakni meyakinkan KNIP bahwa hasil-hasil KMB adalah hasil yang maksimum yang dapat dicapai waktu itu dan mengadakan persiapan menganbil alih pemerintahan Belanda di Indonesia. Pada tanggal 14 November 1949 dua orang delegasi Indonesia, yaitu T. B. Simatupang dan Mohamad Roem kembali ke tanah air.

Persetujuan KMB dapat diterima dengan baik dalam sidang kabinet RI pada tanggal 18 November 1949, sedangkan KNIP meratifikasi persetujuan KMB pada tanggal 15 Desember 1949 dengan 226 suara pro dan 62 anti, serta 32 suara blanko. Dengan diadakannya persetujuan KMB maka pada 16 Desember 1949 di Kepatihan Yogyakarta dilakukan pemilihan Presiden RIS yang pertama oleh wakil-wakil negara bagian. Dengan suara bulat Presiden Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS yang pertama. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 1949 terbentuklah Kabinet Hatta III.

Kabinet Hatta III yang dibentuk ini merupakan satu-satunya kabinet pada masa RIS yang Mohamad Roem duduk di dalamnya sebagai menteri negara tanpa portofolio. Seperti kabinet-kabinet sebelumnya, Kabinet Hatta III juga mempunyai beberapa program. Program utama yang harus segera dilaksanakan oleh kabinet ini adalah menyelenggarakan penyerahan pengakuan kedaulatan dari

Belanda kepada Indonesia sesuai dengan hasil KMB yang ditandatangani pada 2 November 1949 di Den Haag Belanda.¹¹

Penyerahan kedaulatan tersebut dilaksanakan secara serentak di dua tempat, yakni negeri Belanda dan Indonesia. Untuk melaksanakan hal tersebut, pemerintah RI membentuk panitia khusus bagi pelaksanaan penyerahan kedaulatan di Indonesia, sedangkan di negeri Belanda akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta.

Berkenaan dengan panitia khusus tersebut, Mohamad Roem ditugaskan menjadi ketua Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan penyerahan kedaulatan di Indonesia, termasuk serah terima departemen-departemen. Tugas tersebut seluruhnya selesai dalam waktu kurang dari dua bulan. Dalam hal ini Mohamad Roem dibantu oleh wakil ketua panitia yakni Anak Agung Gde Agung.¹²

Setelah berbagai persiapan selesai dilakukan, akhirnya pada 27 Desember 1949 dilakukan upacara penyerahan kedaulatan di Istana *Op den Dam* Amsterdam-Belanda dan Istana Merdeka-Jakarta. Upacara penyerahan kedaulatan kerajaan Belanda kepada RIS di Amsterdam dihadiri oleh Ratu Juliana yang berwenang menandatangani Piagam Penyerahan Kedaulatan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Moh. Hatta yang disertai beberapa orang menteri RIS, di antaranya Sultan Hamid II. Sedangkan penyerahan kedaulatan di Jakarta dilakukan oleh wakil mahkota Belanda di Indonesia yaitu H. V. K. Lovink kepada wakil RIS yaitu Sri Sultan HB IX yang didampingi oleh Mohamad Roem. Dalam

¹¹ Iin Nur Insaniwati, 2002, *Mohamad Roem Karir Politik dan Pengabdianannya*, Indonesiatara, Magelang, hlm. 97

¹² Soemarso Soemarsono, *op. cit.*, hlm. 162

upacara di Indonesia ada sesuatu yang tidak dapat dilangsungkan di Belanda, yaitu turunya bendera Merah Putih Biru dan digantikan dengan penaikan bendera Merah Putih ke atas tiang. Menurut Mohamad Roem, saat-saat itulah yang dirasakan paling khidmat.

Dengan adanya penyerahan kedaulatan tersebut, RIS diakui secara resmi oleh Belanda sebagai negara yang berdaulat penuh dan berkedudukan sejajar dengannya. Satu tahap telah terselesaikan, Kabinet Hatta III harus segera bekerja kembali untuk menyelesaikan program-program berikutnya. Namun Mohamad Roem yang masih menjabat sebagai menteri negara tanpa portofolio harus menerima tugas baru yang dipikulakan di pundaknya, yakni menjadi Komisararis Agung di negeri Belanda pada 19 Januari 1950. Suatu jabatan yang tidak sembarang orang dipercaya memangkunya mengingat tidaklah mudah menghadapi Belanda di negerinya sendiri.

Bagi Masyumi, kepergian Mohamad Roem sebagai duta besar atau Komisararis Agung menimbulkan satu masalah tersendiri karena perhatiannya masih diperlukan untuk pengembangan partai. Namun, kedudukannya sebagai duta besar untuk negeri Belanda tersebut dirasa sangat penting sehingga Moh. Hatta meminta kerelaan partai Masyumi untuk melepaskannya.¹³

Sebagai Komisararis Agung di Belanda yang berkedudukan di Den Haag, Mohamad Roem harus mengalihkan kantor *Commissariat Voor Indische Zaken* dengan 1500 pegawai yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Belanda atau

¹³ Deliar Noer, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 199

orang Indonesia yang berjiwa kolonial. Dari 1500 pegawai, Mohamad Roem berhasil merampingkannya menjadi beberapa ratus saja.

Tugas lain Mohamad Roem adalah mempersiapkan alam pikiran Belanda untuk melepaskan Irian Barat dari penguasaannya. Dalam hal ini Mohamad Roem menyatakan usahanya tidak berhasil.¹⁴ Masalah Irian Barat merupakan masalah yang rumit karena Belanda tidak mau melepaskan Irian Barat ke tangan Indonesia.

Situasi politik Indonesia pada tahun 1950 merubah bentuk negara federal yang berbentuk RIS berubah menjadi NKRI, menyebabkan dipanggilnya Mohamad Roem ke tanah air untuk diberi jabatan baru menteri luar negeri dalam Kabinet Natsir yang baru dibentuk menggantikan Kabinet Hatta III. Kedudukannya di Belanda digantikan oleh wakilnya yaitu Mr. Djumhana.

Mohamad Roem telah banyak memberikan sumbangan bagi bangsa Indonesia. Karena kerja keras dan usahanya itu ia mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan bersama dengan tokoh-tokoh lainnya. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam pemerintahan, menjabat sebagai menteri luar negeri dan duta besar membantu pemerintah demi bangkitnya Indonesia setelah mengalami keterpurukkan akibat dijajah oleh Belanda dalam waktu yang lama.

¹⁴ Soemarso Soemarsono, *op. cit.*, hlm. 162

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

PENUTUP

Mohamad Roem adalah Pahlawan Nasional bagi bangsa Indonesia yang memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ia adalah seorang politikus dan diplomat yang ulung yang dengan tenaga dan pikirannya berusaha membentuk negara Indonesia ke taraf yang lebih baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai peranan Mohamad Roem dalam pemerintahan serta hasil yang diperolehnya bagi tegaknya kedaulatan bangsa Indonesia. Dalam penelitian mengenai Mohamad Roem: Seorang Pejuang Diplomasi Indonesia (1946-1949) membahas mengenai latar belakang kehidupan Mohamad Roem hingga mampu terjun ke dunia politik, peranan politik Mohamad Roem sebagai pejuang diplomasi, kemudian hasil yang diperoleh Mohamad Roem ketika menjadi seorang diplomat ternama. Dari uraian bab II, III dan IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mohamad Roem mulai mengenal dan terjun ke dunia politik dilatar belakang oleh beberapa faktor, yaitu keluarga (masa-masa kecil hingga remaja), pendidikan, dan keikutsertaannya dalam organisasi politik. Keadaan keluarga yang mendukung dan lingkungan yang tidak asing membuat Mohamad Roem terlibat dalam dunia politik. Mohamad Roem hidup dalam lingkungan keluarga yang demokratis sekaligus juga feodalistik sehingga kemudian akan mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Terlebih lagi ketika ia tinggal di Pekalongan bersama dengan kakak

perempuannya, karena dari sanalah ketertarikannya dalam terhadap politik mulai terlihat.

Dalam kehidupan sehari-hari selain bersekolah, Mohamad Roem juga diajarkan ilmu agama yaitu membaca kitab suci Al'Quran (mengaji). Sebagai seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi agama, ia harus pandai mengaji dan menguasai ilmu agama. Selain sekolah, ia juga mengikuti beberapa organisasi yang ada pada saat itu. Organisasi inilah yang pada akhirnya membawa Mohamad Roem aktif dalam bidang politik, yaitu *Jong Java* dan JIB (*Jong Islamieten Bond*). *Jong Java* adalah organisasi pemuda yang di dalamnya adalah pemuda yang berasal dari suku Jawa. Sedangkan JIB adalah organisasi Islam yang di dalamnya terdiri dari pemuda-pemudi Islam yang ingin memperjuangkan ajaran Islam. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Mohamad Roem melanjutkan kiprahnya dalam bidang politik di beberapa organisasi politik seperti Gerakan Penyadar dan PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia)

Keaktifannya dalam organisasi Gerakan Penyadar dan PSII ini membawanya terlibat dalam kancah politik di Indonesia. Dan ketika masa pendudukan Jepang, Mohamad Roem sempat membentuk suatu organisasi yang diberi nama *Jawa Hokokai* dan Barisan *Hizbullah* pada tahun 1944. Keterlibatannya dalam bidang politik ini sebagian besar banyak dipengaruhi oleh Haji Agus Salim. Melalui Haji Agus Salim inilah Roem banyak mengenal tokoh-tokoh politik besar lainnya seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Mohamad Natsir dan lain-lain.

Mohamad Roem adalah tokoh nasional dan pejuang diplomasi yang terkenal. Ia adalah seseorang yang mempunyai bakat besar untuk menjadi seorang pejuang sekaligus perunding. Ia juga seorang yang cerdas, ulet dan sabar. Kepribadiannya itulah yang kemudian menjadi salah satu bekalnya untuk berjuang. Disamping sifat sebagai pejuang tersebut, juga menonjol kemampuannya untuk tampil sebagai pemimpin yang mencita-citakan persatuan bangsanya dan menuntunnya melalui jalan bermusyawarah tanpa mengorbankan prinsip pendiriannya selain sebagai seorang pejuang, Mohamad Roem juga tampil sebagai seorang perunding (diplomat) yang memperoleh kesempatan emas dalam sejarah kehidupannya untuk mengembangkan kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Maka tak heran jika Roem dipercaya untuk ikut serta berperan dalam meja perundingan karena kemampuannya itu. Peranan Mohamad Roem kala itu sebagai seorang diplomat antara lain sebagai anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Linggadjati (1946), sebagai anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Renville (1947-1948), sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam perundingan Roem-Royen (1948), dan sebagai Wakil Ketua Delegasi Indonesia dalam KMB (1949).

Hasil perjuangan dalam bidang politik yang dilakukan Mohamad Roem merupakan usahanya dalam mempertahankan kedaulatan negara RI. Hasil dari usahanya ini diakui telah membuka jalan ke perundingan selanjutnya yaitu KMB, yang pada kesempatan itulah pada akhirnya Indonesia memperoleh kedaulatannya. Keberhasilan Mohamad Roem dalam bidang politik ini dapat ditunjukkan dengan terciptanya suatu pernyataan yang dikenal dengan Pernyataan Roem-Royen (*Roem-*

Royen Statements). Apa yang dicapai Mohamad Roem dalam pernyataan itu merupakan puncak perjuangannya dalam bidang diplomatik. Hasil karya diplomat tersebut yakni suatu pernyataan van Royen dan Mohamad Roem merupakan dokumen bersejarah yang penting bagi kelanjutan tegaknya RI. Dengan demikian dokumen Roem-Royen menempati kedudukan yang khas yang dikenal di seluruh dunia. Ini pula yang telah menempatkan Mohamad Roem dalam deretan nama-nama diplomat dunia dengan hasil karya yang senafas dengan sebutan nama pribadi.¹ Dari latar belakang terjadinya perundingan sampai realisasi pernyataan Mohamad Roem, terlihat bahwa Mohamad Roem dengan dukungan dari berbagai pihak telah mencapai puncak perjuangannya dalam bidang diplomatik. Dari keruntuhan yang begitu rupa, dan pemimpin-pemimpin RI yang terpencar-pencar, serta hampir seluruh wilayah RI diduduki oleh Belanda, Mohamad Roem dapat menciptakan kemenangan. Pertama, kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Kedua, diadakannya KMB yang pada akhirnya menghasilkan pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda.²

¹ Soemarso Soemarsono, 1978, *Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 125

² ST Rais Alamsyah, 1952, *Sepuluh Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Mutiara, Jakarta, hlm. 61

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Pringgodigdo

1964 : *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat, Jakarta

Ahmad Basuni

1983 : "*Mohamad Roem Negarawan Besar*", Suara Muhammadiyah,
No. 22, Tahun ke-63, November 2

Ajib Rosidi

Sjariffudin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT, Idayu
Press, Jakarta

Ali Sastroamidjojo

1974 : *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, Kinta, Jakarta

Badudu, J. S

2003 : *Kamus Kata-Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia*, Kompas,
Jakarta

Deliar Noer

1987 : *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Pustaka Utama
Grafiti, Jakarta

Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid XIV, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta

Fachry Ali

1983 : "*Mohamad Roem Diplomat Pejuang*", Prisma, No.6, Tahun XIII,
Juni

Gottschalk, Louis

1986 : *Mengerti Sejarah* (Terj. Nugroho Notosusanto), UI Press, Jakarta

I Gde Anak Agung

1983 : *Renville*, Sinar Harapan, Jakarta

Iin Nur Insaniwati

2002 : *Mohamad Roem Karir Politik dan Pengabdiannya (1924-1968)*,
Indonesiatara, Magelang

Ingleson, John

1983 : *Jalan ke Pengasingan, Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun
1927-1934*, terj. Zamakhsyari Dhofier, LP3ES, Jakarta

Kahin, George Mc Turman

1991 : *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, trjm. Nju Bakdi
Sumanto, UNS-Press, Surakarta

Koentowidjojo

1995 : *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Budaya, Yogyakarta

Mestika Zed

1997: *PDRl Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, Pustaka
Utama Grafiti, Jakarta

Moedjanto, Gregorius

1975 : *Indonesia Abad ke-20 Jilid I dan II*, Kanisius, Yogyakarta

Mohamad Roem

1972 : *Bunga Rampai Sejarah Jilid I*, Bulan Bintang, Jakarta

1977 : *Bunga Rampai Sejarah Jilid II*, Bulan Bintang, Jakarta

1983 : *Bunga Rampai Sejarah Jilid III*, Bulan Bintang, Jakarta

1989 : *Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI*, Gramedia, Jakarta

1972 : *Suka Duka Berunding dengan Belanda*, Idayu Press, Jakarta

1989: *Tiga Peristiwa Bersejarah*, Sinar Hudaya, Jakarta

Mohammad Hatta

1978: *Memoir*, Tintamas, Jakarta

Nasution, A. H.

1976 : *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VII: Periode Renville*, Disjarah AD dan Angkasa, Jakarta

1979: *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid IX*, Disjarah AD dan Angkasa, Bandung

Nugroho Notosusanto (ed.)

1975 : *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Depdikbud

Nugroho Notosusanto

1971 : *Norma-Norma dalam Penelitian dan Penulisan Sejarah*, Dephankam, Jakarta

Ongokham

1989 : *Runtuhnya Hindia Belanda*, PT.Gramedia, Jakarta

Poerwadarminta, W. J. S.

1982 : *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta

Rickleff, M.C

1991 : *Sejarah Indonesia Modern*, trjm. Dharmana Hardjowijono, UGM-Press, Yogyakarta

Sartono Kartodirjo

1989 : *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, PT.Gramedia, Jakarta

Soemarso Soemarsono

1978 : *Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*, Bulan Bintang, Jakarta

Solichin Salam

1984 : "*Ulama Intelek*", Panitia Buku Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim, Sinar Harapan, Jakarta

Suhartono

1994 : *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, Pustaka Pelajar, Jakarta

Suratmin

1986 : *Mohamad Roem Karya dan Pengabdianannya*, Depdikbud, Jakarta

Susanto Tirtoprodjo

1963 : *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia*, Pembangunan, Jakarta

S.T Rais Alamsyah

1952 : *Sepuluh Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Mutiara, Jakarta

Yanto Bashri dan Retno Suffatni (ed.)

2004 : *Sejarah Tokoh Bangsa*, Pustaka Tokoh Bangsa, Yogyakarta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Lampiran 1. Gambar Mohammad Roem



Sumber : ST. Rais Alamsyah, 1952, *10 Orang Indonesia Tebesar Sekarang*,
Jakarta, Mutiara

Lampiran 2 :

KETERANGAN ROEM-VAN ROYEN

7 Mei 1949

Persetujuan Permulaan

Mengenai Kembalinya Pemerintahan Republik

Ke Jogjakarta

Statement Delegasi Republik Indonesia dan *statement* delegasi Belanda dalam pertemuan formil di bawah *auspices* UNCI di Jakarta tanggal 7 Mei 1949.

I. *Statement* Delegasi Republik

(Diucapkan oleh Mohamad Roem)

Sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia saya diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka sendiri (*persoonlijk*), sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 untuk memudahkan tercapainya :

1. Pengeluaran perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya;
2. Kerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, dan

3. Turut serta pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat, dengan tidak bersyarat.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta akan berusaha mendesak supaya politik demikian itu diterima oleh pemerintah RI selekas-lekasnya setelah dipulihkan di Jogjakarta.

II. *Statement* Delegasi Belanda

(Diucapkan oleh van Royen)

1. Delegasi Belanda diberi kuasa menyatakan bahwa, berhubung dengan kesanggupan yang baru diucapkan oleh Mr.Roem, ia menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta. Delegasi Belanda selanjutnya menyetujui pembentukan satu panitia-bersama atau lebih di bawah *auspices* UNCI dengan maksud :
 - a. Mengadakan penyelidikan dan persiapan yang baru sebelum kembalinya pemerintah RI ke Jogjakarta,
 - b. Mempelajari dan memberi nasehat tentang tindakan-tindakan yang akan diambil untuk melaksanakan penghentian perang gerilya dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
2. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintahan RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatannya yang sepatutnya di daerah yang meliputi karesidenan Jogjakarta dan bahwa ini adalah suatu langkah yang

dilakukan sesuai dengan maksud petunjuk-petunjuk Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949.

3. Pemerintahan Belanda menguatkan sekali lagi kesanggupannya untuk menjamin penghentian segera daripada semua gerakan-gerakan militer dan membebaskan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik yang ditangkapnya sejak tanggal 17 Desember 1948 dalam RI.
4. Dengan tidak mengurangi hak-hak bagian bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai yang diakui dalam asas-asas Linggajati dan Renville, pemerintahan Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara atau daerah-daerah di atas daerah yang dikuasai oleh Republik sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan daerah Republik tersebut.
5. Pemerintahan Belanda menyetujui adanya RI sebagai suatu *staat* yang nanti akan duduk dalam Negara Indonesia Serikat. Apabila suatu Badan Perwakilan Sementara untuk seluruh Indonesia dibentuk dan karena itu perlu ditetapkan jumlah perwakilan Republik dalam Badan tersebut, jumlah itu ialah daripada jumlah anggota-anggota semua, diluar anggota-anggota Republik.
6. Sesuai dengan maksud dan tujuan Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949 yang mengenai Konferensi Meja Bundar di Den Haag supaya perundingan-perundingan yang dimaksud oleh Resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 diadakan selekas-lekasnya, maka pemerintahan

Belanda akan berusaha sungguh-sungguhnya supaya konferensi itu segera diadakan sesudahnya pemerintah kembali ke Jogjakarta. Pada konferensi itu perundingan-perundingan akan diadakan tentang cara bagaimana mempercepat kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat sesuai dengan asas-asas Renville.

7. Berhubung dengan keperluan kerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, pemerintah Belanda setuju bahwa dalam segala daerah diluar karesidenan Jogjakarta dimana pegawai sipil, polisi dan pegawai Republik lainnya masih terus bekerja akan tetap dalam jabatan mereka. Dengan sendirinya pembesar-pembesar Belanda membantu pemerintah Republik dalam hal keperluan-keperluan yang dikehendaki menurut pertimbangan yang pantas untuk perhubungan dan konsultasi dengan segala orang Indonesia, terhitung juga mereka yang bekerja dalam jabatan sipil dan militer Republik, dan detail-detail teknik akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak dibawah *auspices* UNCI.

Sumber : Soemarso Soemarsono, 1978, *Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 335-337.

Lampiran 3. Gambar Suasana Perundingan Linggarjati tahun 1946



Sumber : Soemarsono, Soemarso, 1978. *Mohammad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*,
Jakarta, Bulan Bintang

Lampiran 4 Gambar Suasana Perundingan Renville Tahun 1947



Sumber : Soemarsono, Soemarso, 1978. *Mohammad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*,
Jakarta, Bulan Bintang

Lampiran 5. Gambar Suasana Perundingan Roem-Royen Tahun 1948



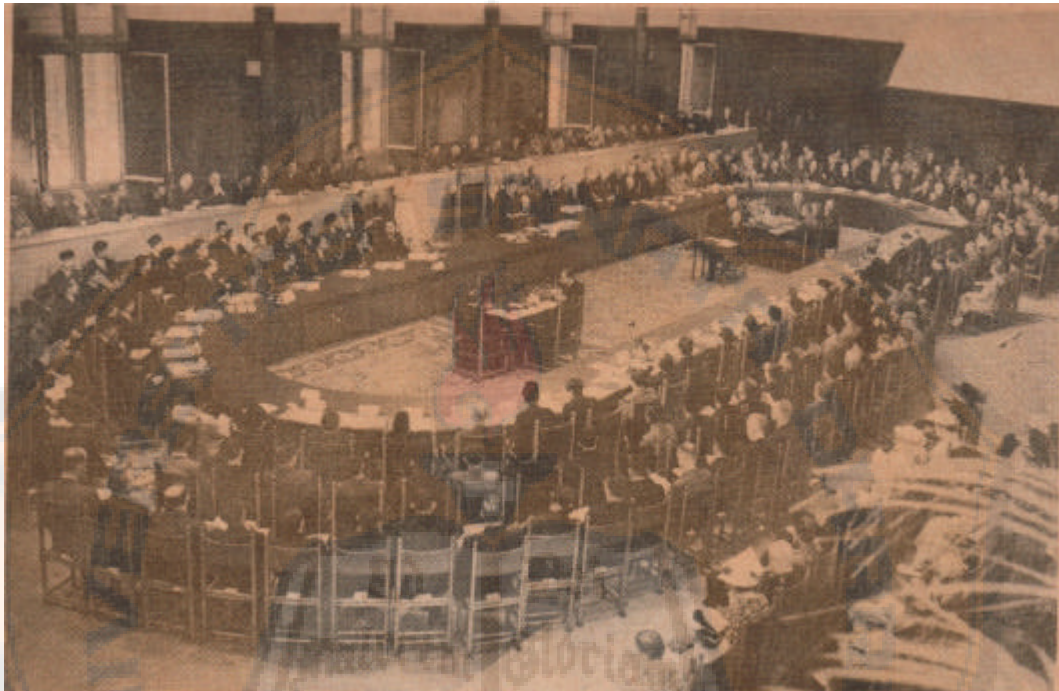
Sumber : Soemarsono, Soemarso, 1978. *Mohammad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*,
Jakarta, Bulan Bintang

Gambar 6. Gambar Suasana Penandatanganan Penyerahan Kedaulatan



Sumber : Soemarsono, Soemarso, 1978. *Mohammad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*,
Jakarta, Bulan Bintang

Gambar 7. Gambar Suasana Perundingan KMB Tahun 1949



Sumber : Soemarsono, Soemarso, 1978. *Mohammad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*,
Jakarta, Bulan Bintang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SILABUS

Nama Sekolah : SMU
 Mata Pelajaran : Sejarah
 Kelas/Program : XII
 Semester : I
 Standar Kompetensi : Menganalisis Perjuangan Bangsa Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Lahirnya Orde Baru

Komp.Dasar	Indikator	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian			Alokasi Waktu	Sumber
				Jenis Tagihan	Bentuk Tagihan	Contoh Tagihan		
Menganalisis perkembangan ekonomi-keuangan dan politik pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 1950	Menjelaskan latar belakang kehidupan Mohamad Roem yang mempengaruhinya untuk terjun ke dunia politik	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang kehidupan Mohamad Roem dari kecil hingga remaja • Latar belakang pendidikan Mohamad Roem • Latar belakang keikutsertaan Mohamad Roem dalam organisasi politik 	Melalui diskusi siswa menjelaskan latar belakang kehidupan Mohamad Roem yang mempengaruhinya untuk terjun ke dunia politik	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas tertulis 	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian 	<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan latar belakang kehidupan Mohamad Roem yang mempengaruhinya untuk terjun ke dunia politik? 	1x45 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Buku paket Mohamad Roem, <i>Bunga Rampai dari Sejarah Jilid I,II,III</i>, Bulan Bintang, Jakarta. Mohamad Roem, <i>Diplomasi</i>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

								<p>: <i>Ujung Tombak Perjuangan RI</i>, Gramedia, Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahan: LKS, gambar-gambar, peta. • Alat: OHP, LCD, Komputer, CD, Internet.
	Menjelaskan peranan Mohamad Roem sebagai seorang diplomat ternama	<ul style="list-style-type: none"> • Peranan Mohamad Roem sebagai anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Linggajati (1946) • Peranan Mohamad 	Melalui diskusi siswa menjelaskan peranan Mohamad Roem sebagai seorang diplomat ternama	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas tertulis 	<ul style="list-style-type: none"> • Pilihan ganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebutkan peranan Mohamad Roem sebagai seorang diplomat ternama? 	1x45 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Buku paket: Mohamad Roem, <i>Bunga Rampai dari Sejarah Jilid I, II, III</i>, Bulan Bintang,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		<p>Roem sebagai anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Renville (1947)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peranan Mohamad Roem sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam perundingan Roem-Royen (1948) • Peranan Mohamad Roem sebagai Wakil Ketua Delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (1949) 					<p>Jakarta. Mohamad Roem, <i>Diplomasi : Ujung Tombak Perjuangan RI</i>, Gramedia, Jakarta. Soemarso Soemarsono, <i>Mohamad Roem 70 tahun Pejuang Perunding</i>, Bulan Bintang, Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahan: LKS, gambar-gambar, transparan, peta.
--	--	---	--	--	--	--	---

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

								<ul style="list-style-type: none"> • Alat: OHP, LCD, Komputer, VCD.
	Menguraikan hasil karya sang diplomat	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan Roem-Royen sebagai hasil karya sang diplomat ternama 	Melalui diskusi siswa menguraikan hasil karya sang diplomat	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas tertulis 	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebutkan hasil karya Mohamad Roem sebagai seorang diplomat ternama? 	1x45 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Paket: Suratmin, <i>Mohamad Roem Karya dan Pengabdianya</i>, Depdikbud, Jakarta. Iin Nur Insaniwati, <i>Mohamad Roem Karir Politik dan Perjuangannya</i>. • Bahan: LKS, gambar-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

									gambar, transparansi, peta. • Alat: OHP, LCD, Komputer, VCD.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Yogyakarta, 24 Maret 2007

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran

Kepala Sekolah

Septi Daru Kurniawati